

BAB II

GAMBARAN UMUM SURAT KABAR KOMPAS DAN REPUBLIKA

A. Perkembangan Pers di Indonesia

Pada perkembangannya di Indonesia, pers memiliki peranan penting dalam perjalanan sejarah di Indonesia. Dimulai dari pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tahun 1945 – 1959 (era Demokrasi Liberal) dimana media massa digiring menjadi organ partai ideologi serta aliran politik atau primordial. Pers bebas merupakan cerminan dari kehidupan politik liberalisme yang cenderung anarkis. Kebebasan pers ini kemudian dihadapi oleh pemerintah dengan tindakan keras. Demokrasi liberal berakhir ketika Orde Lama dimulai. Kemudian memasuki orde lama (Demokrasi Terpimpin) 1959 – 1966, semua media diharuskan menjadi pedoman dan pembela serta alat penyebaran manifesto politik yang dijadikan haluan negara dan program pemerintah. Penerbitan yang tidak mengikuti seluruh atau sebagian ketentuan tersebut akan dicabut izinnya atau tidak memperoleh izin sama sekali (Harahap, 2000 : 122 – 136)

Memasuki orde baru pada 1966 – 1998 atau yang lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila, pemerintah memberikan kebebasan kepada pers untuk pemberitaan kebobrokan orde lama. Kebebasan pers ini berlangsung dalam kurun waktu 8 tahun (1966 – 1974). Pada 1974, pers Indonesia kembali mengalami kemunduran setelah peristiwa pembredelan yang dilakukan kepada harian Indonesia Raya pada 15 Januari 1974 atau yang kemudian lebih dikenal dengan

“Peristiwa Malari”. peristiwa ini, sekaligus merupakan “tonggak sejarah” bagi Kompas, yang pada sebelum peristiwa malari, Kompas dikenal sebagai surat kabar yang idealis dan “menyuarakan hati nurani rakyat” seperti motto dan kontrol sosial secara kritis dan berani. Setelah peristiwa malari, fungsi Kompas sebagai *bulldog* (anjing penjaga) berubah menjadi interpreter pernyataan pemerintah (Harahap, 2000 : 136 – 144)

Jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada Mei 1998 menandai berakhirnya orde baru sekaligus lahirnya era reformasi. Hal ini juga menjadi titik kebebasan bagi pers. Banyak bermunculan media-media baru dengan berbagai kemasan dan segmentasi. Pemerintah kemudian menjamin pers melalui UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.40 tahun 1999 tentang pers.

B. Kompas

1. Profil Kompas

Ide pembuatan surat kabar atau harian Kompas berawal dari Jenderal Ahmad Yani yang meminta kepada Frans Seda yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Partai Katolik sekaligus Menteri Perkebunan atas permintaan Jenderal Ahmad Yani untuk membuat koran. Keinginan ini kemudian diteruskan kepada pimpinan-pimpinan partai Katolik pada saat itu, P.K. Ojong dan Jacob Oetama.

Pada awalnya, Kompas bernama "Bentara Rakyat". Hal ini dikarenakan semua koran, penerbitan, dan organisasi yang berada dibawah Partai Komunis Indonesia (PKI) menggunakan kata 'rakyat'. Maksud dari penggunaan nama Bentara Rakyat sendiri dimaksudkan agar rakyat mengerti bahwa sebenarnya yang membela rakyat bukan PKI dan 'Kompas' berbeda dengan koran-koran dibawah naungan PKI yang memanipulasi makna rakyat. Karena menjelang tahun 1965, suhu politik di Indonesia semakin memanas ketika PKI secara sepihak menyerukan untuk membentuk angkatan kelima guna menghadapi ABRI yang merupakan alat keamanan negara yang sah. PKI juga melakukan penyerobotan tanah milik negara. Selain itu, banyak media yang telah dikuasai oleh PKI. Hal inilah yang menyebabkan munculnya keinginan untuk membuat koran yang bisa menandingi kekuatan PKI.

Menjelang terbitnya Bentara Rakyat, Frans Seda berkunjung ke Istana Negara dan pada saat itu presiden Soekarno mengusulkan nama Bentara Rakyat diganti menjadi 'Kompas' yang berarti sebagai media pencari fakta dari segala penjuru. Penggunaan nama 'Kompas' dilakukan sebagai nama koran yang akan diterbitkan.

Kompas pertama kali diterbitkan pada 18 Juni 1965 dengan *headline* "KAA II Ditunda Empat Bulan". Pada edisi perdana ini, Kompas hanya menyajikan 4 halaman yang dipenuhi dengan 11 berita luar negeri dan 7 berita dalam negeri. Pada waktu itu Kompas belum memiliki tajuk rencana dan hanya

pada halaman 2 ada catatan dari pemimpin redaksi mengenai lahirnya Kompas. Semula Kompas hanya memiliki 8 halaman dan hanya terbit 4 kali seminggu. Dalam kurun waktu 2 tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan jumlah 30.650 eksemplar (<http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2011/06/28/selamat-ulang-tahun-kompas/>, 3 Juli 2012)

Pada awalnya, Kompas memperlihatkan kedekatan dengan Partai Katolik. Hal ini terjadi karena dua pendirinya, yaitu P.K Ojong dan Jacob Oetama adalah petinggi dari partai tersebut. Menjadi hal yang normatif ketika pendiri sekaligus pemilik sebuah media mempunyai ideologi yang sama. Dalam buku Politik Media Mengemas Berita yang disusun oleh Nugroho, Eriyanto, dan Sudiarsis dinyatakan bahwa, Ketika Partai Katolik difusikan ke dalam PDI pada tahun 1973, Kompas mulai berusaha menjadi koran yang independen dan lebih berorientasi bisnis. Meskipun demikian, latar belakangnya sebagai koran yang dekat dengan kekuatan Katolik mempengaruhi posisi Kompas dalam berbagai kekuatan politik, terutama bila perdebatan itu menyangkut atau menyinggung kekuatan politik Islam (Nugroho, Eriyanto, dan Sudiarsis, 1999 : 7)

Dalam sejarahnya, Kompas pernah mengalami pembredelan oleh pemerintah dan kesemuanya merupakan larangan massal dimana tidak hanya Kompas yang dilarang terbit. Yang pertama terjadi setelah peristiwa 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI. Pelarangan terbit dilakukan sejak tanggal 2-6 Oktober 1965. Larangan ini dikeluarkan oleh

boleh terbit hanya media dari pemerintah. Pembredelan yang kedua terjadi ketika demonstrasi mahasiswa akhir tahun 1977 dan awal 1978. Selain Kompas, tujuh harian lainnya juga dilarang terbit (Harahap, 2000 : 138)

Pada tahun 1970, P.K Ojong melakukan diversifikasi usaha dengan mendirikan Toko Buku Gramedia untuk memperkuat penyebaran buku-buku yang berasal dari luar negeri di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun berikutnya, Kompas mendirikan perusahaan percetakan Gramedia di Jalan Palmerah Selatan guna menjamin Kompas dapat terbit pagi hari. Percetakan ini kemudian diresmikan oleh Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta pada November 1972. Pada perkembangannya, tahun 1997 Kompas membangun sistem cetak jarak jauh (*remote printing*) sebagai terobosan baru teknologi percetakan untuk mempercepat distribusi Kompas di daerah. Pada awal tahun 1990-an Kompas menjadi sebuah induk dari 38 anak perusahaan yang kemudian dikenal dengan Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Kompas juga memperkuat jaringan dengan membuka kantor-kantor perwakilan di kota-kota lain seperti Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Palembang, Pontianak, dan Medan. Selain itu, Kompas juga menjalin kerjasama dengan kantor berita Antara, Reuters, *Associated Press* (AP) dan beberapa kantor berita asing lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses peliputan berita baik di dalam

Harian Kompas terbit rata-rata mencapai 500.000 eksemplar per harinya dengan distribusi hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Kompas memiliki sumber daya wartawan yang berjumlah 230 orang yang ditempatkan di berbagai kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi sampai Papua.

Seperti kebanyakan surat kabar lainnya, Kompas dibagi menjadi tiga halaman bagian, yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, kemudian bisnis dan keuangan, dan bagian olahraga. Ada penambahan bagian khusus iklan yang disebut dengan Klasika. Perbaikan manajemen terus dilakukan oleh Kompas, salah satunya dengan menyerahkan urusan audit terhadap sirkulasi Kompas kepada *Audit Bureau of Circulations* (ABC) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang standar industri terpercaya dalam angka sirkulasi audit.

2. Struktur Organisasi Kompas

Pemimpin Umum	:	Jacob Oetama
Wakil Pemimpin Umum	:	Agung Adiprasetyo Lilik Oetama
GM Litbang	:	F. Harianto Santoso
GM SDM Umum	:	Bambang Sukartiono
Manajer Diklat	:	Tony D. Widiastono
Direktur Bisnis	:	Hardanto Subagyo
GM Iklan	:	Elly Handojo

Wakil Pemimpin Redaksi : Trias Kuncahyono
Taufik M. Mihardja
Redaktur Senior : Ninok Leksono
Redaktur Pelaksana : Budiman Tanuredjo
Wakil Redaktur Pelaksana : Andi Surudji
James Luhulima
Sekretaris Redaksi : Retno Bintarti
M. Natsir

3. Alamat Redaksi

Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270

Tel : (021) 537710 | 537720 | 537730

Fax : (021) 5486085 | 5483581

Email : kompas@kompas.com

Rekening : Bank BNI 1946 (Cab. Jakarta Kota) : 14132806

Bank BRI (Cab. Jakarta Kota) : 0019.01000168308

Giro Pos : A 13.444

C. Republika

1. Profil Republika

Republika berasal dari kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ICMI pada 5 Desember 1990, dengan salah satu programnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan 5K, Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir (Hasrullah, 2001 : 15)

Untuk membentuk tujuan diatas, beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat yang berdedikasi dan mempunyai komitmen yang tinggi pada pembangunan bangsa serta beragama Islam membentuk sebuah yayasan yang dikenal dengan Yayasan Abdi Bangsa pada 17 Agustus 1990, dengan program utamanya yang meliputi pembangunan *Islamic Centre*, pengembangan *Centre of Information and Development Studies (CIDES)*, penerbitan harian umum Republika (Hasrullah, 2001 : 15)

Untuk merealisasikan program pertama tentang penerbitan surat kabar, pada 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT. Abdi Bangsa dan pada 19 Desember 1992 memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUPP) nomor 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 dari Departemen Penerangan. Nama Republika sendiri berasal dari Presiden Soeharto yang sebelumnya akan diberi nama Republik sebagai surat kabar yang akan diterbitkan. Dan setelah melalui

Yayasan Abdi Bangsa sendiri didirikan oleh 48 orang yang terdiri beberapa menteri, pejabat tinggi negara, cendekiawan, tokoh masyarakat dan pengusaha. Nama-nama yang berada dibalik yayasan ini antara lain, Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, Ibnu Sutowo, Mu. Hasan, Ibu Tien Soeharto (alm), Probosutedjo, Ir. Aburizal Bakrie, Nurcholis Madjid, Amien Rais, Quraish Shihab dan lain-lain. Presiden RI saat itu, Soeharto, berperan sebagai pelindung yayasan. Sedangkan B.J Habibie yang menjabat Menristek dan ketua umum ICMI, sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa.

Penerbitan Republika menjadi motivasi tersendiri bagi umat muslim yang ada di Indonesia, karena pada masa sebelumnya, pers Islam tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi umat muslim, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu, untuk pengembangan usahannya, PT. Abdi Bangsa melakukan penjualan saham kepada masyarakat. Penjualan saham dilakukan dengan sistem satu keluarga hanya boleh memiliki satu lembar saham. Dengan menawarkan sebanyak 2,9 juta saham, maka PT. Abdi Bangsa menjadi perusahaan dengan jumlah pemilik saham terbesar di dunia, karena sahamnya dimiliki oleh 2,9 juta keluarga (Hasrullah, 2001 : 18)

David T. Hill menggambarkan bagaimana Republika mulai berdiri melalui tulisannya, Hill mengatakan bahwa "Republika dibentuk bersama atas pengaruh dari beberapa negara besar dari para intelektual Islam liberal dan para jurnalis,

peristiwa dan isu dicakup dengan lebar oleh koran sekuler yang berisi ideologi Islam yang sama seperti Kompas atau Suara Pembaharuan yang berideologi Kristen (Hill, 1995 : 126)

Dalam hal ini Hill memberikan gambaran tentang bagaimana Republika lahir dengan memiliki watak ganda sejak awal. Ia mewakili kepentingan kelas menengah muslim, intelektual, dan jurnalis muslim. Dan pada saat yang bersamaan ia juga mewakili mereka yang ada di pemerintahan. Pada masa orde baru, pers Islam tersingkir oleh dominasi media sekuler dan Kristen.

Republika terbit pertama kali dengan latar belakang politik yang penting, dimana ia akan hadir di tengah pembaca yang mayoritas Islam tetapi pangsa pasar dikuasai oleh kelompok Kristen ini membuat suatu dilema yang dikatakan oleh Hill lebih lanjut, "Hal ini agak mengejutkan banyak pengamat luar negeri dimana sementara lebih dari 80% masyarakat Indonesia dikelompokkan sebagai muslim, dua koran harian terbesar bekerja sama dengan kepentingan Kristen. Secara keseluruhan ada cerita sedih dari usaha yang gagal untuk bertahan pada tahun 1974 dan terutama pada pertengahan 1980-an, dimana media Islam dipinggirkan oleh banyak ahli sekuler dan kepentingan Kristen (Hill, 1995 : 124)

Pada awal berdirinya, Republika tidak jauh dari pengaruh Presiden Soeharto yang sedang membangun kekuatan Islam setelah hubungan dengan antara Soeharto dengan ABRI mulai menurun. Strategi Soeharto ini menjadi taktik balasan dimana militer tidak lagi menjadi tumpuan untuk semakin

yang mewakili pemerintah. Dari sisi jurnalisme, Republika diharapkan dapat secara profesional membangun konsistensi dengan misi Islam.

Setelah 7 tahun setelah berdirinya Republika, tepatnya pada November 2000, Group Mahaka Media mengambil alih koran Republika karena utangnya yang semakin menumpuk. Group Mahaka Media adalah salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia dengan memiliki berbagai media lain, yaitu Jak TV, Radio One Jakarta, Prambors, Majalah Golf Digest, A Plus Magazine, Mahaka Advertising, dan lainnya. Setelah dimiliki oleh Mahaka Media, Republika mulai melakukan pembenahan di berbagai aspek di perusahaannya. Pada 2004, Republika dikelola oleh PT. Republika Media Mandiri (RMM), sementara PT. Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk (*Holding Company*) (Wardati, 2007 : 58)

Visi dan misi Republika sendiri adalah menjadikan Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin yaitu Rahmat bagi semua makhluk di dunia. Dan misinya adalah menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen

2. Struktur Organisasi Republika

Direktur Utama	:	Erick Tohir.
Wakil Direktur Utama	:	Daniel Wewengkang
Direktur Pemberitaan	:	Ikhwanul Kiram Mashuri
Direktur Operasional	:	Tommy Tamtomo
GM Keuangan	:	Didik Irianto
GM Marketing dan Sales	:	Yulianingsih
Manajer Iklan	:	Indra Wisnu Wardhana
Manajer Produksi	:	Nurrokhim
Manajer Sirkulasi	:	Darkiman Ruminta
Manajer Keuangan	:	Hery Setiawan
Pemimpin Redaksi	:	Nasilin Masha
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Arys Hilman Nugraha
Redaktur Pelaksana	:	Elba Damhuri
Kepala Newsroom	:	Maman Sudiaman
Kepala Republika Online	:	M. Irwan Ariefyanto
Redaktur Senior	:	Anif Punto Utomo
Wakil Redaktur Pelaksana	:	Irfan Junaidi, Johar Arief, Firkah Fansuri, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto.

Sekretaris Redaksi : Fachrul Ratzi
Kepala Quality Control dan Bahasa : Rakhmat Hadi Sucipto
Reporter Senior : Harun Husein,
Muhammad Subarkah,
Nurul S. Hamami,
Selamat Ginting,
Siwi Tri Puji Budiwiyati,
Teguh Setiawan.
Kepala Desain : Sarjono

3. Alamat Redaksi

Jl. Warung Buncit Raya 37, Jakarta 12510

Tel : (021) 7803747 (Hunting) | (021) 79184744 (Iklan)

Fax : (021) 7800649 (Redaksi) | (021) 7981169 (Iklan) |

(021) 79198442 (Sirkulasi dan Berlangganan)

Email : sekretariat@republika.co.id

Rekening Bank a.n PT. Republika Media Mandiri

Bank BSM (Cab. Warung Buncit) : 003.011.3448

Bank Mandiri (Cab. Warung Buncit) : 127.000.424.0642

Bank Lippo (Cab. Warung Buncit) : 727.30.028.988

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada beberapa minggu menjelang diadakannya konser Lady Gaga di Indonesia atau yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 3 Juni 2012, beberapa pihak dan organisasi masyarakat memberikan pernyataan untuk menolak konser tersebut diadakan. Mereka memberikan berbagai alasan terkait penolakan tersebut. Kontroversi ini terus berlangsung hingga pada tanggal 27 Mei 2012, dimana Lady Gaga secara resmi mengumumkan pembatalan konsernya di Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pihak manajemennya dan juga akun *twitter* Lady Gaga. Dalam pernyataannya, Lady Gaga menjelaskan bahwa pembatalan tersebut berkaitan dengan kontroversi yang terjadi belakangan ini mengenai rencana konsernya di Indonesia.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena kontroversi tersebut menjadi sempat menjadi perhatian tersendiri bagi media terutama bagi Kompas dan Republika, yang merupakan dua media besar di Indonesia yang mempunyai ideologi atau cara pandang yang berbeda terhadap berita yang sama, yakni terhadap kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia. Sesuai dengan paradigma konstruksionis yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki konstruksi yang berbeda terhadap realitas yang sama.

A. Sajian Data

Data yang akan disajikan dalam bab ini adalah pemberitaan yang

konser Lady Gaga di Indonesia dalam kurun waktu 15 Mei 2012 – 3 Juni 2012 atau dimana pada saat pemberitaan kontroversi tersebut sedang marak dimuat di kedua media baik Kompas maupun Republika. Judul pemberitaan akan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Judul – judul pemberitaan kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia pada Kompas dan Republika

No	Tanggal	Kompas	Republika
1	Selasa, 15 Mei 2012	Polda Metro Jaya Tak Beri Rekomendasi	
2	Jumat, 18 Mei 2012	Dira Sugandi : Belajar dari Lady Gaga	
3	Sabtu, 19 Mei 2012	Konser Lady Gaga Dievaluasi : Promotor terus berkomunikasi dengan Manajemen	Polisi Ancam Bubarkan Konser
4	Senin, 21 Mei 2012	Djoko Suyanto : Kompromikan Dulu	
5	Selasa, 22 Mei 2012	Polda Metro Jaya Siap Amankan Konser Lady Gaga	Sikap Polri Melunak
6	Rabu, 23 Mei 2012	Puti Guntur Soekarno : Aturan Konser	a. Visa Lady Gaga Sudah Diterbitkan b. Indonesia Pasar Potensial Konser Asing c. Kontroversi Lady Gaga di Sejumlah Negara
7.	Kamis, 24 Mei 2012	a. Belum Ada Putusan Rekomendasi Konser b. Lady Gaga : Curhat di Twitter	a. Penolakan Lady Gaga Meluas b. Tipis Kemungkinan Lady Gaga ke Bali
8.	Jumat, 25 Mei 2012	Penolakan Konser Masih	a. Tolak Konser Lady

		Bergulir	Gaga b. Superstar yang Urakan dan Aneh c. Polda Tegaskan tak Berikan Rekomendasi
9	Sabtu, 26 Mei 2012		a. Patuhi Hukum b. Komnas Anak : Lady Gaga Berdampak Negatif c. Gaga Diminta Hormati Budaya Indonesia
10	Senin, 28 Mei 2012	Polda Metro Bantah Tak Mampu Jaga Keamanan	a. Konser Lady Gaga(1) b. Uang Tiket Konser Dikembalikan Utuh c. Polemik Lady Gaga Rugikan Bangsa d. Harusnya Ada Pembatasan Umur
11	Selasa, 29 Mei 2012	Polda Minta Uang Tiket Dikembalikan Penuh	
12	Kamis, 31 Mei 2012	Sorotan Dunia : Citra Indonesia Dipertaruhkan	
13	Minggu, 3 Juni 2012	Lady Gaga : "Aku adalah Segala yang Kalian Benci..."	

B. Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis *framing* terhadap dua media cetak, yaitu Kompas dan Republika mengenai kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia pada berita yang dimuat sebelum tanggal 28 Mei 2012 atau sebelum Lady Gaga secara resmi mengumumkan pembatalan konsernya. Seperti yang diketahui, kontroversi tersebut sempat menjadi bahan pemberitaan oleh media-media di Indonesia, terutama oleh kedua media tersebut. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan masing-masing berita dari kedua media tersebut untuk mengetahui bagaimana *framing* yang terdapat dalam kedua media tersebut.

1. Frame Kompas : Konser Lady Gaga Masih Memiliki Peluang Untuk Digelar

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan melakukan analisa terhadap cara pembingkaiian pemberitaan Kompas yang menyatakan bahwa konser Lady Gaga masih memiliki peluang untuk dapat digelar di Indonesia. Analisa dilakukan pada beberapa berita yang dimuat Kompas dan mencerminkan frame Kompas tersebut.

a. Djoko Suyanto : Kompromikan Dulu (Senin, 21 Mei 2012)

Tabel 3.2
Analisis Kompas, 21 Mei 2012

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : Kompromikan Dulu 2) Latar : pro dan kontra terhadap konser Lady Gaga

	<p>3) Sumber :</p> <p>a) Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto</p> <p>b) Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saad Usman Nasution</p> <p>4) Pernyataan : Kompromi dan komunikasi adalah jalan tengah yang bisa ditempuh pihak yang pro dan kontra</p> <p>5) Penutup : Pernyataan Polda Metro yang mengaku sudah bertemu dengan penyelenggara dan mengungkapkan jika pihak penyelenggara dapat memahami alasan tidak dikeluarkannya rekomendasi terhadap konser Lady Gaga di Jakarta</p>
Skrip	<p>6) <i>What</i> : Tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto terkait kontroversi rencana konser Lady Gaga</p> <p>7) <i>Who</i> : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto</p> <p>8) <i>Where</i> : Jakarta</p> <p>9) <i>When</i> : Minggu, 20 Mei 2012</p> <p>10) <i>Why</i> : -</p> <p>11) <i>How</i> : Djoko Suyanto meminta Kepala Polri untuk mengakomodasi dan berkomunikasi dengan dua pihak yang berbeda pendapat</p>
Tematik	<p>12) Perlunya kompromi antara pihak yang pro dan kontra terhadap rencana konser Lady Gaga</p>
Retoris	<p>13) Penggunaan pilihan kata : Polemik,</p>

Analisis sintaksis terhadap berita yang dimuat oleh Kompas pada hari Senin, 21 Mei 2012, Kompas memuat berita dengan *headline* 'Djoko Suyanto: Kompromikan dulu'. Dilihat dari penggunaan judul berita tersebut, sudah jelas frame apa yang akan

pejuang untuk tetap digelar. *Lead* yang dimuat kemudian menjelaskan latar dari berita tersebut.

“...Terkait polemik kedatangan Lady Gaga, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta Kepala Polri untuk mengakomodasi dan berkomunikasi dengan dua pihak yang berbeda pendapat...” (Kompas, 21 Mei 2012)

Kompas menggunakan Djoko Suyanto sebagai sumber informasi utama pada beritanya. Pemilihan sumber ini sengaja dilakukan Kompas karena selain mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi dalam pemerintahan sebagai salah satu Menteri, Djoko Suyanto juga dianggap memiliki pandangan yang sama dengan Kompas. Disamping selain menampilkan Djoko Suyanto, Kompas juga mengambil sumber informasi dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution terkait dasar tidak dikeluarkannya izin konser Lady Gaga tersebut.

Dari analisis skrip pada berita tersebut, Kompas mencoba menampilkan tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sebagai peristiwa yang diberitakan. Kompas menekankan pemberitaan tersebut pada unsur bagaimana upaya Djoko Suyanto dalam melihat pro dan kontra rencana konser Lady Gaga yang terjadi, yakni dengan meminta Kepala Polri untuk mengakomodasi dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Unsur ini terdapat pada *lead* yang telah dibahas

juga memperlihatkan bahwa Kompas tidak menyampaikan secara utuh unsur-unsur kelengkapan berita lainnya, seperti dimana tepatnya tempat berita tersebut diambil dan kenapa peristiwa tersebut terjadi.

Pada analisis tematik, wartawan Kompas mencoba menuliskan sebuah tema tentang perlunya kompromi antara pihak yang pro dan kontra terhadap rencana konser Lady Gaga yang disampaikan oleh Djoko Suyanto. Penegasan tema tersebut dapat dilihat dalam kutipan pernyataan yang disampaikan oleh sumber berikut.

“...”Saya sudah menyampaikan kepada Kapolri agar dikompromikan antara yang pro dan kontra. Yang penting kedua pihak harus didengar dan diakomodasi,” kata Djoko, Minggu (20/5)...” (Kompas, 21 Mei 2012)

“...Menurut Djoko, kompromi dan komunikasi adalah jalan tengah yang bisa ditempuh pihak yang pro dan kontra...” (Kompas, 21 Mei 2012)

Untuk mendukung tema ini, dalam teks beritanya kemudian wartawan Kompas menguraikan secara detail penjelasan maksud dari pernyataan yang diperoleh dari sumber informasi. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan teks berita berikut.

“...Kompromi bisa dilakukan pada segi kostum, koreografi, tempat, serta gerak penari latar maupun Lady Gaga...” (Kompas, 21 Mei 2012)

“...Selain itu, lagu-lagunya yang dinyanyikan juga harus disepakati dan dikompromikan agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. “Agar tidak menampilkan sesuatu yang

Dalam kutipan kedua teks berita tersebut terlihat bagaimana wartawan Kompas mencoba menjelaskan pernyataan sumber dalam hal apa seharusnya kompromi dilakukan agar Lady Gaga dapat diterima oleh mereka yang menolak dan agar konser dapat tetap dilaksanakan. Tema ini sekaligus menegaskan sikap Kompas dalam melihat kontroversi konser Lady Gaga tersebut.

Pada analisis retorik, ditemukan penggunaan pemilihan kata yang sengaja dilakukan oleh wartawan Kompas untuk memberikan makna tertentu terhadap berita yang ingin disampaikan. Pemilihan kata 'kompromi' yang terdapat pada judul dan isi berita dimaksudkan agar kontroversi rencana konser Lady Gaga sebaiknya dibicarakan dengan cara baik-baik. Dan penggunaan kata 'polemik' yang terdapat pada *lead* berita dimaksudkan agar menimbulkan kesan yang lebih halus dibandingkan menggunakan kata 'kontroversi'. Selanjutnya,

Gambar 3.1

Tampilan Berita Pada Kompas, 21 Mei 2012

KONSER LADY GAGA

Djoko Suyanto: Kompromikan Dulu

JAKARTA, KOMPAS — Terhakt polemik kehadiran Lady Gaga. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta Kepala Polri untuk mengkomodasi dan berkomunikasi dengan dua pihak yang berbeda pendapat.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kapolri agar dikompromikan antara yang pro dan kontra. Yang penting kedua pihak harus didengar dan diakomodasi," kata Djoko Minggu (20/5).

Menurut Djoko, seharusnya bisa dikoordinasikan dan dikompromikan dengan pihak manajemen artis dan penyelenggara soal penampilan Lady Gaga di panggung Indonesia. Kompromi bisa dilakukan pada segi kostum, koreografi, tempat, serta gerak penari latar maupun Lady Gaga.

Selain itu, lagu-lagunya yang dinyanyikan juga harus dievaluasi dan dikompromikan agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. "Agar tidak menampilkan sesuatu yang vulgar," kata Djoko.

Menurut Djoko, kompromi dan komunikasi adalah jalan tengah yang bisa ditempuh pihak

yang pro dan kontra.

"Selinggi show-nya bisa jalan, tapi aspirasi yang mengkhawatirkan penampilannya juga diwadahi," kata Djoko.

Menurut dia, bisa ada kesepakatan tertulis antara Polri, penyelenggara, dan manajemen artis. "Ini yang saya sampaikan kepada Kapolri untuk dilakukan pengelolaan," kata mantan Panglima TNI ini.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bergeming tidak merekomendasi konser Lady Gaga. Dengan dasar rekomendasi Polda Metro ini, Mabes Polri pun memutuskan untuk tidak mengizinkan konser Lady Gaga (Kompas, 16/5).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saad Usman Nasution mengatakan, Polda Metro Jaya selaku penanggung jawab wilayah tidak merekomendasikan konser tersebut.

Pihak Polda Metro mengaku sudah bertemu dengan penyelenggara dan sudah mengungkapkan jika pihak penyelenggara dapat memahami alasan tidak dikeluarkannya rekomendasi terhadap konser Lady Gaga di Jakarta. (20/5)

(Sumber: koran Kompas, 21 Mei 2012)

b. Belum Ada Putusan Rekomendasi Konser (Kompas, 24 Mei 2012)

Tabel 3.3
Analisis Kompas, 24 Mei 2012

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : Belum ada putusan rekomendasi konser 2) Latar : pro dan kontra terhadap konser Lady Gaga 3) Sumber : a) Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unrung S Rajab b) Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto c) Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar d) Gubernur Bali Made Mangku Pastika 4) Pernyataan : Rekomendasi akan diberikan apabila penyelenggara melengkapi semua persyaratan administrasinya 5) Penutup : Kutipan pernyataan Untung S Rajab tentang pemberian rekomendasi terhadap konser
Skrip	6) <i>What</i> : Rekomendasi konser Lady Gaga 7) <i>Who</i> : Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab 8) <i>Where</i> : Jakarta 9) <i>When</i> : Rabu, 23 Mei 2012 10) <i>Why</i> : Pihak penyelenggara belum melengkapi persyaratan administrasi konser 11) <i>How</i> : Rekomendasi akan diberikan apabila penyelenggara melengkapi semua persyaratan administrasinya dan memperhatikan norma dan estetika masyarakat Indonesia
Tematik	12) Peluang untuk mendapatkan rekomendasi konser dari Polda Metro Jaya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi

Retoris	13) Penggunaan pilihan kata : Bergulir, Sejumlah, Konser Ricuh, Konflik Horizontal, Mengacau
---------	--

Pada analisis sintaksis terhadap berita yang dimuat oleh Kompas pada hari Kamis, 24 Mei 2012, Kompas menyajikan berita dengan *headline* 'Belum ada putusan rekomendasi konser'. Dari pemilihan judul tersebut, sepertinya Kompas berusaha meyakinkan kepada pembaca bahwa konser Lady Gaga masih memiliki kemungkinan untuk tetap digelar. Hal ini kemudian dijelaskan dalam *lead* yang dimuat oleh Kompas berikut.

“...Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab memastikan pihaknya akan memberi rekomendasi konser Lady Gaga asalkan penyelenggara melengkapi administrasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta memperhatikan norma dan etika masyarakat Indonesia...” (Kompas, 24 Mei 2012)

Dalam *lead* tersebut juga sekaligus disebutkan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam *lead* tersebut juga sekaligus menyebutkan pihak yang menjadi sumber informasi dari berita yang dimuat oleh Kompas, yaitu Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab.

Selain itu, Kompas juga mengambil sumber informasi lain untuk menguatkan berita yang dibawanya, antara lain Kepala Bidang Humas Polda Metro jaya Komisaris Besar Rikwanto, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar dan

berita mengenai pendapatnya apabila konser Lady Gaga--tersebut – dipindah ke Bali.

“...Gubernur Bali Made Mangku Pastika sebelumnya juga mengatakan, konser tersebut dapat digelar di Bali asalkan Polri memberi izin..” (Kompas, 24 Mei 2012)

Dari kutipan teks pada penutup berita tersebut, dapat dilihat kembali frame yang dilakukan Kompas mengenai masih adanya kemungkinan untuk tetap menggelar konser tersebut.

Dari analisis skrip, berita tersebut memiliki unsur kelengkapan sebuah berita dengan menampilkan 5W + 1H, namun pada bagian dimana peristiwa itu diberitakan, wartawan Kompas kurang dapat memberikan keterangannya secara spesifik. Berita itu sendiri lebih banyak mengisahkan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi.

Sedangkan pada analisis tematik, tema yang ingin disampaikan oleh wartawan Kompas, yakni peluang untuk mendapatkan rekomendasi konser dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara konser. Tema ini terdapat pada *lead* berita yang ditampilkan oleh Kompas. Untuk mendukung tema yang disampaikan, pada paragraf selanjutnya, Kompas memuat kutipan pernyataan dari sumber informasi..

“...”Mempertimbangkan adanya pro dan kontra, maka saya akan memberi rekomendasi apabila penyelenggara melengkapi semua persyaratan administrasinya serta mempertimbangkan norma dan estetika masyarakat Indonesia,” kata Untung S Rajab, Rabu (23/5) pagi...” (Kompas, 24 Mei 2012)

Wartawan Kompas kemudian menampilkan penjelasan lain oleh Untung S Rajab terhadap pernyataan yang telah disampaikan, yaitu harapan Untung S Rajab bahwa pernyataannya sudah jelas dan bisa dipahami sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi terkait rekomendasi konser Lady Gaga. Selain memuat pernyataan dari Untung S Rajab, wartawan Kompas memuat pernyataan dari sumber lain untuk memperkuat tema yang disampaikan.

“...Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan, selama penyelenggara tidak melengkapi persyaratan formal dari beberapa instansi, Polda tidak akan memberi rekomendasi. Selain itu, perlu diperhatikan juga rekomendasi bukan satu-satunya hal yang bisa membuat izin dikeluarkan...” (Kompas, 24 Mei 2012)

Setelah penulisan teks berita diatas, selanjutnya wartawan Kompas mencoba menampilkan kutipan pernyataan langsung yang disampaikan oleh Rikwanto mengenai syarat lain yang harus diperhatikan penyelenggara konser, antara lain dengan memperhatikan norma-norma yang ada di Indonesia dan dituangkan dalam bentuk komitmen-komitmen serta persyaratan formal yang belum dilengkapi, dalam hal ini izin dari kepariwisataan dan ketenagakerjaan.

Wartawan Kompas juga memuat pernyataan sumber dari Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Rikwanto mengenai proses kelengkapan formal yang belum terpenuhi oleh penyelenggara

juga akan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Agama dan MUI terhadap rencana konser Lady Gaga di Indonesia. Selain itu, wartawan Kompas mencoba menjelaskan sikap Polri yang menegaskan bahwa apapun keputusan yang dihasilkan, diharapkan semua pihak tetap patuh pada hukum yang berlaku.

Isi teks pada penutup berita yang memuat pernyataan yang disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terkait kesediaan Bali sebagai tempat alternatif konser Lady Gaga yang akan digelar dengan syarat mendapatkan izin dari Polri tersebut juga turut menjelaskan frame Kompas terhadap kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia.

Pada analisis retoris, terdapat penekanan yang dilakukan oleh wartawan Kompas pada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Untung S Rajab sebagai Kepala Polda Metro Jaya. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Kompas agar dapat menegaskan apa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan sekaligus memperlihatkan frame Kompas itu sendiri.

“...Saya akan memberi rekomendasi apabila penyelenggara melengkapi semua persyaratan administrasinya. Untung S Rajab...” (Kompas, 24 Mei 2012)

Gambar 3.2

Tampilan Berita Pada Kompas, 22 Mei 2012

Tark

Page 1 of 2

Lady Gaga: Belum Ada Putusan Rekomendasi Konser

KOMPAS(Nasional) • Kamis, 24 May 2012 Halaman: 26 Penulis: RTS; FER; DEN Ukuran: 2020 YDQJ
Pengindex: pik.susy

LADY GAGA

Belum Ada Putusan Rekomendasi Konser

Jakarta, Kompas — Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab memastikan pihaknya akan memberi rekomendasi konser Lady Gaga asalkan penyelenggara melengkapi administrasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta memperhatikan norma dan etika masyarakat Indonesia.

"Mempertimbangkan adanya pro dan kontra, maka saya akan memberi rekomendasi apabila penyelenggara melengkapi semua persyaratan administrasinya serta mempertimbangkan norma dan etika masyarakat Indonesia," kata Untung Rajab, Rabu (23/5) pagi.

Ia berharap, keterangan yang diberikannya itu sudah jelas dan bisa dipahami sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi terkait rekomendasi konser Lady Gaga.

Terkait pelaksanaan konser itu, Kepala Polda Metro mengimbau tidak ada lagi penjualan karcis pertunjukan sebelum ada izin pelaksanaan pertunjukan keluar dari Mabes Polri. "Jangan menambah permasalahan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Kikwanto menjelaskan, selama penyelenggara tidak melengkapi persyaratan formal dari beberapa instansi, Polda tidak akan memberi rekomendasi. Selain itu, perlu diperhatikan juga rekomendasi bukan satu-satunya hal yang bisa membuat izin dikeluarkan.

"Penyelenggara perlu memperhatikan juga norma-norma yang ada di Indonesia dan itu dituangkan dalam bentuk komitmen-komitmen," katanya.

Adapun mengenai persyaratan formal yang belum dilengkapi penyelenggara konser Lady Gaga dalam permohonan rekomendasinya, kata Kikwanto, adalah izin dari keporiwisataan dan ketenagakerjaan.

Hal yang sama sebelumnya disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Refli Amar. Polri masih menunggu penyelenggara melengkapi persyaratan yang diperlukan. "Proses kelengkapan formal belum terpenuhi," kata Boy.

Terlepas dari masalah persyaratan itu, menurut Boy, apa pun keputusan kepolisian untuk memberikan izin penyelenggaraan keramaian atau tidak, pasti ada pihak yang tidak senang. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat menaati aturan hukum.

"Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas, silakan tempuh jalur hukum," katanya.

Tark

Page 2 of 2

Boy menambahkan, Polri tentu akan mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Polri akan meminta pendapat dari Kementerian Agama dan MUI," tuturnya.

Gubernur Bali Made Mangku Pasika sebelumnya juga mengatakan, konser tersebut dapat digelar di Bali asalkan Polri memberi izin. (RTS/FER/DEN)

"Saya akan memberi rekomendasi apabila penyelenggara melengkapi semua persyaratan administrasinya. Untung S Rajab"

Lihat Juga Video "Polda Tetap Tak Keluarkan Izin untuk Lady Gaga" di
vod.kompas.com/poldaladygaga

c. Penolakan Konser Masih Bergulir (Kompas, 25 Mei 2012)

Tabel 3.4
Analisis Kompas, 25 Mei 2012

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : Penolakan Konser Masih Bergulir 2) Latar : aksi penolakan konser 3) Sumber : Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Agus Suradika dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto 4) Pernyataan : Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Polda Metro Jaya mencegah dan tidak memberi izin untuk penyelenggaraan segala macam pertunjukan yang mengumbar syahwat 5) Penutup : Pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika tentang pemindahan konser ke Bali
Skrip	6) <i>What</i> : Penolakan konser Lady Gaga 7) <i>Who</i> : Sejumlah organisasi massa dan lembaga dakwah Islam se-DKI Jakarta 8) <i>Where</i> : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya, Jakarta 9) <i>When</i> : Kamis, 24 Mei 2012 10) <i>Why</i> : Konser Lady Gaga dinilai mengumbar aksi kurang pantas dan porno 11) <i>How</i> : Mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Polda Metro Jaya mencegah dan tidak memberi izin penyelenggaraan segala macam pertunjukan yang mengumbar syahwat.
Tematik	12) Penolakan terhadap konser penyanyi Lady Gaga menguat 13) Masih ada peluang untuk mendapatkan rekomendasi konser dari Polda Metro Jaya

Retoris	14) Penggunaan pilihan kata : Bergulir, Sejumlah, Konser Ricuh, Konflik Horizontal, Mengacau
---------	--

Pada analisis sintaksis terhadap berita yang dimuat oleh Kompas pada hari Jumat, 25 Mei 2012, Kompas menyajikan berita dengan *headline* “Penolakan Konser Masih Bergulir”. Dari penggunaan judul *headline* tersebut, sudah jelas berita apa yang akan disampaikan oleh Kompas. Hal ini kemudian dijelaskan pada *lead* yang dimuat oleh Kompas.

“...Penolakan terhadap konser penyanyi Lady Gaga menguat. Sejumlah organisasi massa dan lembaga dakwah Islam se-DKI Jakarta, Kamis (24/5), turut menyatakan menolak konser musik penyanyi asal Amerika Serikat yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno itu...” (Kompas, 25 Mei 2012)

Dari teks berita yang dimuat, Kompas menampilkan dua narasumber atau sumber informasi berita mereka, yakni Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Agus Suradika dan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto.

“...Penolakan itu diutarakan sesuai rapat ormas dan lembaga dakwah Islam di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Kamis Sore, oleh Agus Suradika, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta...” (Kompas, 25 Mei 2012)

“...Hingga Kamis siang, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Komisaris Besar Rikwanto, pihaknya belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dari penyelenggara...” (Kompas, 25 Mei 2012)

Secara keseluruhan dari berita yang ditampilkan oleh Kompas

penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, maupun rekomendasi konser yang belum diberikan oleh pihak kepolisian.

Pada penutup berita, Kompas kembali menampilkan kutipan pernyataan dari Rikwanto mengenai informasi yang diperoleh dari pihak penyelenggara. Seperti halnya dengan analisa yang dilakukan pada Kompas edisi 22 Mei 2012, dimana Kompas dengan sengaja melakukan hal tersebut agar pembaca dapat melakukan penilaiannya sendiri.

Selanjutnya pada analisa skrip, Kompas menampilkan secara lengkap unsur yang terdapat dalam sebuah berita, yakni 5W + 1H. Peristiwa yang diberitakan adalah aksi penolakan konser Lady Gaga yang dilakukan oleh sejumlah organisasi massa dan lembaga dakwah Islam se-DKI Jakarta pada hari Kamis, 24 Mei 2012 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta. Kemudian Kompas juga menuliskan bagaimana peristiwa penolakan tersebut terjadi, yakni dengan mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya mencegah dan tidak memberikan izin kepada pihak penyelenggara terhadap segala bentuk pertunjukan yang mengumbar syahwat. Dalam teks beritanya, Kompas juga menyebutkan siapa saja yang tergabung dalam aksi penolakan tersebut.

“...Pertemuan itu dihadiri, antara lain wakil dari Mathla’ul Anwar, Persatuan Islam, Muslimat NU, Aisyiyah dan

Wartawan Kompas sendiri mengisahkan berita tersebut kepada bagaimana jalannya aksi penolakan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan agar konser Lady Gaga di Indonesia batal digelar.

Disamping memberitakan aksi penolakan terhadap konser Lady Gaga, wartawan Kompas juga menambahkan pernyataan mengenai kemungkinan rekomendasi yang akan diperoleh pihak penyelenggara apabila dapat memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Penambahan tersebut sekaligus menegaskan sikap Kompas yang menilai bahwa ditengah-tengah kontroversi yang terjadi, konser Lady Gaga masih memiliki peluang untuk tetap dapat digelar

Kemudian pada **analisis tematik**, wartawan Kompas mencoba menuliskan fakta yang terjadi dalam dua tema. Yang pertama adalah penolakan terhadap konser menguat. Dalam teks beritanya, tema ini terlihat jelas pada *headline* dan *lead* yang dimuat oleh Kompas. Untuk mendukung tema tersebut, pada isi teks berita, Kompas menampilkan penjelasan secara detail dari proses aksi penolakan konser yang sedang dilakukan. Selanjutnya, tema tersebut dituliskan oleh wartawan Kompas dengan cara tertentu yakni dengan menggunakan bentuk kalimat tidak langsung dari pernyataan yang disampaikan oleh sumber informasi. Hal ini dapat dilihat pada teks berita yang ditampilkan berikut ini terkait upaya yang dilakukan demonstran dalam menolak konser Lady Gaga.

norma serta estetika masyarakat Indonesia...” (Kompas, 25 Mei 2012)

Untuk mendukung tema yang dituliskan oleh wartawan Kompas diatas, berikutnya wartawan Kompas menguraikan perkembangan terbaru yang diperoleh dari sumber informasi. Perkembangan yang disampaikan mengenai dokumen persyaratan yang belum diterima oleh Polda Metro Jaya. Namun, pada penutup berita, wartawan Kompas menampilkan kutipan pernyataan dari Rikwanto yang mendapat informasi bahwa pihak penyelenggara sudah memiliki beberapa persyaratan.

“...”Kami mendapat informasi dari pihak penyelenggara, mereka sudah mengantongi izin visa kerja bagi artis dan pendukung konser dari Imigrasi,” katanya...” (Kompas, 25 Mei 2012)

Kutipan tersebut sengaja ditampilkan pada penutup berita agar pembaca bisa menentukan pandangannya sendiri. Pada kutipan teks tersebut juga sekaligus dapat memperlihatkan frame Kompas yang menekankan bahwa walaupun penolakan terhadap konser semakin bertambah, namun Kompas yakin bahwa masih ada peluang bahwa konser tersebut tetap dapat digelar di Indonesia.

Melalui analisis retorik, terdapat beberapa penggunaan pilihan kata yang sengaja dilakukan untuk menekankan suatu makna tertentu terhadap berita tersebut. Penggunaan kata ‘bergulir’ pada *headline*

mengetahui bahwa kontroversi penolakan konser Lady Gaga ternyata masih terjadi.

Selanjutnya, Kompas menggunakan kata 'sejumlah' pada *lead* untuk memberikan gambaran demonstran dilakukan untuk memberikan kesan bahwa pihak yang menolak konser Lady Gaga dapat dihitung jumlahnya atau hanya beberapa pihak saja. Penggunaan kata 'mengacau', 'ricuh', dan 'konflik horizontal' yang dilakukan wartawan Kompas cenderung ingin menggambarkan bahwa para demonstran, dalam hal ini sejumlah organisasi massa dan lembaga dakwah Islam se-DKI Jakarta yang disebutkan adalah pihak yang

Gambar 3.3

Tampilan Berita Pada Kompas, 25 Mei 2012

METROPOLITAN

LADY GAGA

Penolakan Konser Masih Bergulir

JAKARTA, KOMPAS — Penolakan terhadap konser penyanyi Lady Gaga mengait. Sejumlah organisasi massa dan lembaga di bawah Islam se-DKI Jakarta, Kamis (24/5), turut menyatakan menolak konser musik penyanyi asal Amerika Serikat yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno itu.

Penolakan itu diutarakan melalui rapat ormas dan lembaga di bawah Islam di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Kamis sore, oleh Agus Supradika, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri antara lain wakil dari Majelis Ulama, Persatuan Islam, Mus-

limat NU, Alsyiah, dan Muhammadiyah.

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Polda Metro Jaya menegah dan tidak memberi izin untuk penyelenggaraan segala macam pertunjukan yang mengumbar syahwat. Konser penyanyi Lady Gaga yang bermula dengan Stefani Joanne Angelina Germanotta itu dinilai mengumbar aksi kurang pantas dan porno.

Namun, menurut Agus, apabila konser tetap terjadi, mereka tidak akan mengait. "Kami mengawadi dan menyiapkan langkah hulum," katanya.

Langkah yang diambil, lanjut Agus, misalnya memperkarkan

promotor dan panitia jika konser ricuh atau muncul konflik horizontal. Pejabat Polri dan pemerintah yang memberi izin juga akan dipersoalkan. "Kami akan mendorong partai politik untuk menggunakan peran di DPR memanggil para pejabat," katanya.

Kemarin siang, di Bundaran Hotel Indonesia, puluhan pemuda Hizbut Tahrir Indonesia menggelar unjuk rasa anti-konser Lady Gaga.

Rekomendasi

Polda Metro kembali memasukan dapat merekomendasikan konser Lady Gaga dengan catatan penyelenggara menyetujui per-

yaratan administrasi dan konser dipagar sesuai norma serta etika masyarakat Indonesia.

Hingga Kamis siang, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Komisaris Besar Hukwanto, pihaknya belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dari penyelenggara.

Persyaratan yang belum dipenuhi oleh penyelenggara, seperti visa dan izin kerja dari imigrasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

"Kami dapat informasi dari pihak penyelenggara, mereka sudah mengantongi izin visa kerja bagi artis dan pendukung konser dari imigrasi," katanya.

BUW/RTS

2. Frame Republika : Konser Lady Gaga Layak Untuk Ditolak

Pada pembahasan selanjutnya, peneliti akan melakukan analisa terhadap cara pembingkaihan pemberitaan Republika yang menyatakan bahwa konser Lady Gaga layak untuk ditolak. Analisa dilakukan pada beberapa berita yang dimuat oleh Republika dan mewakili dari frame yang telah disebutkan.

a. Polisi Ancam Bubarkan Konser (Republika, 19 Mei 2012)

Tabel 3.5
Analisis Republika, 19 Mei 2012

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Headline</i> : Polisi ancam bubarkan konser2) Latar : Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan rekomendasi konser3) Sumber :<ol style="list-style-type: none">a) Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwantob) Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Panec) Mantan Ketua Umum Pengurus Besar, Nadhlatul Ulama Hasyim Muzadid) Humas Big Daddy Entertainment, Arif Ramadhoni4) Pernyataan : Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengancam akan membubarkan konser Lady Gaga jika penyanyi berjudul 'Mother Monster' itu tetap pentas di Jakarta.5) Penutup : Humas Big Daddy Entertainment, Arif Ramadhoni menyatakan pihaknya akan mencermati dinamika yang terjadi atas kontroversi penyelenggaraan konser.
Skrip	<ol style="list-style-type: none">6) <i>What</i> : Sikap Polda Metro Jaya dalam menghadapi kontroversi konser Lady Gaga

	<p>7) <i>Who</i> : Polda Metro Jaya</p> <p>8) <i>Where</i> : Jakarta</p> <p>9) <i>When</i> : Jumat, 18 Mei 2012</p> <p>10) <i>Why</i> : Keputusan Polda Metro Jaya tidak memberikan rekomendasi karena Lady Gaga dinilai bertolak belakang dengan budaya Indonesia</p> <p>11) <i>How</i> : Polda Metro Jaya mengancam akan membubarkan konser apabila penyelenggara tidak mematuhi rekomendasi kepolisian</p>
Tematik	12) Sikap kepolisian yang melarang Lady Gaga untuk tampil di Indonesia
Retoris	13) Penggunaan kata: Ancam dan 'Mother Monster'

Dari analisis sintaksis yang dilakukan pada berita yang dimuat oleh Republika pada hari Jumat, 25 Mei 2012, Republika menyajikan berita dengan *headline* 'Polisi ancam bubarkan konser'. Sebenarnya dari penggunaan judul berita tersebut, kita dapat melihat Republika secara jelas bahwa Republika ingin menyampaikan bahwa pihak kepolisian menolak diadakannya konser Lady Gaga di Indonesia. Hal ini kemudian dijelaskan dalam *lead* yang dimuat sebagai berikut.

"...Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengancam akan membubarkan konser Lady Gaga jika penyanyi yang ber juluk 'Mother Monster' itu tetap pentas di Jakarta. Langkah tersebut merupakan upaya terakhir kalau penyelenggara tidak mengindahkan rekomendasi kepolisian..." (Republika, 19 Mei 2012)

Dari kutipan *lead* tersebut juga Republika sekaligus menjelaskan

tindakan terakhir dalam menanggapi kontroversi yang terjadi atas rencana konser Lady Gaga di Indonesia.

Dalam pemberitaannya, Republika menampilkan beberapa sumber selain Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Kepala Bidang Humas mereka Komisaris Besar Rikwanto, antara lain mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dan dari pihak penyelenggara konser Big Daddy Entertainment yang diwakili oleh Humas mereka, Arif Ramadhoni. Pemilihan sumber tersebut sengaja dilakukan oleh wartawan Republika untuk menguatkan berita yang mereka ingin sampaikan.

Pada penutup berita, Republika menampilkan penjelasan dari pihak penyelenggara konser Lady Gaga di Indonesia, Big Daddy Entertainment, Arif Ramadhoni selaku humas penyelenggara yang menyatakan pihaknya akan mencermati dinamika yang terjadi atas kontroversi penyelenggaraan konser.

Pada analisis skrip dari berita tersebut, wartawan menampilkan secara lengkap unsur kelengkapan yang harus dimiliki dalam sebuah berita. Peristiwa yang diangkat oleh Republika adalah mengenai sikap Polda Metro Jaya dalam menghadapi kontroversi rencana konser Lady Gaga pada Jumat, 18 Mei 2012. Namun, wartawan Republika kurang

Adapun sebab peristiwa itu terjadi adalah keputusan Polda Metro Jaya tidak memberikan rekomendasi karena Lady Gaga dinilai bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut diberitakan, Republika mencoba menjelaskan langkah yang akan diambil Polisi untuk menghadapi kontroversi yang terjadi dengan mengancam bahwa akan membubarkan konser tersebut.

Wartawan Republika itu sendiri menitikberatkan berita pada penyebab ancaman pembubaran konser sebagai langkah terakhir yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dijelaskan bahwa penyebab sikap Polda Metro Jaya tersebut adalah karena mereka telah sepakat untuk tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap konser.

Dari analisis tematik terhadap berita tersebut, ada sebuah tema yang ingin disampaikan oleh wartawan Republika, yaitu sikap kepolisian yang melarang Lady Gaga untuk tampil di Indonesia. Untuk mendukung tema yang ingin disampaikan, selain dalam *lead* yang dimuat oleh Republika, wartawan Republika kemudian menguraikan secara detail sikap kepolisian tersebut pada isi teks beritanya.

Wartawan Republika mencoba membahas lebih dahulu penjelasan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto seperti yang terdapat

pernyataan dari Rikwanto mengenai penegasan sikap Mabes Polri yang tidak memberikan izin atas penyelenggaraan konser Lady Gaga.

“...Apalagi, kata Rikwanto, Mabes Polri juga telah menegaskan sikapnya untuk tidak memberikan izin atas penyelenggaraan konser Lady Gaga. Kepastian sikap tersebut disampaikan secara lisan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution...” (Republika, 19 Mei 2012)

Selain pernyataan sikap yang disampaikan dalam teks berita tersebut, Republika juga dengan sengaja menampilkan keputusan lisan yang disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution tersebut untuk menguatkan pandangan Republika sendiri bahwa konser Lady Gaga layak untuk ditolak. Demikian pula dengan penambahan pada teks berita berikutnya bahwa sikap Polisi yang akan membubarkan konser yang disampaikan oleh Rikwanto, sama dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya itu sendiri

Selanjutnya, wartawan Republika menuliskan bahwa pihak polisi telah bertemu dengan pihak penyelenggara dan pihak polisi mengatakan bahwa penyelenggara dapat menerima keputusan Polda Metro Jaya untuk tidak memberikan rekomendasi konser. Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan kutipan pernyataan Rikwanto yang dimuat berikut.

“...”Pertemuan sekitar setengah jam antara promotor dengan polisi akhirnya berujung pada keputusan akan ketiadaan rekomendasi dari Polda Metro Jaya,” kata Rikwanto di Jakarta, Jumat (18/5)...” (Republika, 19 Mei 2012)

Tentang Rekomendasi itu sendiri, Republika memuat teks berita yang berisikan penjelasan pendapat dari Polda Metro Jaya tidak memberikan rekomendasi karena Lady Gaga dinilai bertolak belakang dengan budaya Indonesia.

“...Mengenai tidak keluarnya rekomendasi konser Lady Gaga, Rikwanto menegaskan, kepolisian tidak melihat ‘Mother Monster’ itu sebagai artis mancanegara yang berasal dari negara tertentu. Sampai kemarin, katanya, sudah ada 54 artis mancanegara yang datang ke Indonesia dan mendapatkan izin konser. “Karena, mereka relatif tidak bertolak belakang dengan budaya kita,” kata Rikwanto...” (Republika, 19 Mei 2012)

Wartawan Republika juga menambahkan pendapat dari mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi yang mendukung sikap kepolisian tersebut. Republika menampilkan pernyataan langsung Hasyim Muzadi yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan konser Lady Gaga tidak seimbang antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, serta perspektif HAM tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang merusak seperti konser tersebut karena dapat memperparah kondisi budaya di Indonesia sendiri.

Selain menampilkan pendapat dari Hasyim Muzadi, Republika kembali memperkuat tema yang disampaikan dengan menambahkan pernyataan dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang mendukung sikap kepolisian dengan meminta mereka untuk menjaga konsistensi sikap tersebut. Penambahan dua sumber

Secara keseluruhan wartawan Republika sebenarnya ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa, jika pihak kepolisian yang dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuatan atas hukum saja melarang konser Lady Gaga, maka demikian pula yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Dari analisis retorik terhadap berita tersebut, terdapat beberapa penggunaan pemilihan kata untuk menekankan makna tertentu yang ingin disampaikan oleh wartawan Republika. Penggunaan kata 'ancam' yang terdapat pada judul berita dan 'mengancam' pada teks berita dilakukan oleh wartawan Republika untuk menghasilkan makna bahwa sikap polisi sangat tegas dalam menghadapi kontroversi konser Lady Gaga dan mereka siap melakukan apa saja agar konser tersebut dibatalkan.

Selain itu, penggunaan julukan Lady Gaga 'Mother Monster' disebutkan sebanyak dua kali oleh Republika. Hal ini dilakukan tentunya juga dengan secara sengaja oleh wartawan Republika untuk mengesankan bahwa Lady Gaga adalah seorang yang benar-benar

Gambar 3.4
Tampilan Berita Pada Republika, 19 Mei 2012

Polisi Ancam Bubarkan Konser

■ Indan Wulandari

IPW meminta kepolisian konsisten melarang Lady Gaga.

JAKARTA — Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengancam akan membubarkan konser Lady Gaga jika penyanyi berjudul "Mother Monster" tersebut merupakan upaya sorok-hiduk kalau penyelenggara tidak mengeh-dahkan rekomendasi kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komser Polin Rikwanto menyatakan, rekomendasi Polda Metro Jaya ihwal penyelenggaraan konser Lady Gaga sudah bulat. Keputusan untuk tidak memkomendasikan konser sudah tidak bisa dibantah lagi.

Apalagi, kata Rikwanto, Mabes Polri juga telah menetapkan sikapnya untuk tidak memberikan izin atas penyelenggaraan konser Lady Gaga. Kebijakan secara luas oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Saad Usman Nasution.

Rikwanto melanjutkan, apabila penyelenggara tetap berkeinginan melaksanakan konser pada 3 Juni 2012 di Gelora Bung Karno maka polisi akan menubuhkan secara paksa konser. Langkah pembubaran selaras dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya yang juga menegaskan hal yang sama.

Menurut Rikwanto, pihak penyelenggara parti sudah membaham keputusan Polda Metro Jaya lantaran pada pertemuan dengan kepolisian Selasa (14/5) kemarin, penyelenggara sudah memperlihatkan pemahaman atas keputusan Polda Metro Jaya.

"Pertemuan sekitar setengah jam antara promoter dengan polisi akhirnya berujung pada keputusan akan kerdagaan rekomendasi dari Polda Metro Jaya," kata Rikwanto di Jakarta, Jumat (18/5).

Selain menegaskan sikap kepolisian, Rikwanto juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara konser musik, tak semata konser Lady Gaga, agar meminta izin keramaian terlebih dulu sebelum melakukan penjualan tiket. Hal itu dilakukan guna mencegah segala potensi kekecewaan yang bisa dilatiri penonton konser.

Rikwanto pun menyangkan proses penjualan tiket konser sebelum adanya izin keramaian dari kepolisian. Dia mengaku, selama ini memang tidak ada aturan baku mengenai waktu penjualan penyenggaraan konser. Bahkan, biasanya permintaan izin sejumlah konser terbelah ditayangkan setelah penjualan tiket terjual sebagian. Jadi, memang tidak ada peraturannya, tapi kalau ternyata tidak sesuai itu kita yang rugi penyelenggara, calon penonton juga kecewa," ucap Rikwanto.

Mengenai sikap ketidaksiannya rekomendasi konser Lady Gaga, Rikwanto meyakini, kepolisian tidak melihat "Mother Monster" itu sebagai artis mancanegara yang berasal dari negara tetangga. Sampai kemarin, katanya, sudah ada 34 artis mancanegara yang datang ke Indonesia dan mendapatkan izin konser. "Karena, mereka relatif tidak bertolak belakang dengan budaya kita," kata Rikwanto.

Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi mendukung keputusan polisi tak memberikan lampu hijau konser Lady Gaga. Menurut Hasyim, konser Lady Gaga hanya akan banyak membawa kerendahan bagi umat. "Penyelenggaraan konser tidak seimbang antara manfaat dan kerugiannya," kata Hasyim.

Rukun sipi masalah keamanan, lanjut Hasyim, konser Lady Gaga bisa bisa menimbulkan masalah keamanan. "Perpektif HAM tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang merusak seperti ini. Bisa memperparah kondisi perang budaya yang sedang berkecamuk di Indonesia," katanya.

Kondisi kepolisian untuk tidak mengizinkan izin konser Lady Gaga juga mendapatkan dukungan Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Nien S Pate justru meminta kepolisian agar konsisten atas sikapnya tersebut. "Kalau Polri sudah menilai ada potensi porokoki, ya tugas Polda Metro Jaya untuk menegakkan dan melarang konser," kata Nita.

Sementara itu, pihak penyelenggara konser belum menyuarakan langkah dan menentang mereka untuk mengupayakan konser tetap berjalan. Big Dobby Entertainment selaku promoter konser, Entertaiment selaku promoter konser, melalui humasnya Arif Ramadhaod mengatakan, saat ini manajemen tengah menencanai dinamika yang terpuh menyangkut kontroversi penyelenggaraan konser.

(Sumber: koran Republika, 19 Mei 2012)

b. Penolakan Lady Gaga Meluas (Republika, 24 Mei 2012)

Tabel 3.6
Analisis Republika, 24 Mei 2012

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Headline</i> : Penolakan Lady Gaga Meluas 2) <i>Latar</i> : Pro dan kontra Lady Gaga 3) <i>Sumber</i> : <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua LBH Buddhis Indonesia Pusat, Budiman b) Mantan Ketua MPR, Amien Rais c) Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushala Indonesia, Rhoma Irama d) Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel e) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), Reyna Usman f) Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar g) Kapolda Metro Jaya, Irjen Untung S Rajab 4) <i>Pernyataan</i> : Penolakan terhadap rencana konser Lady Gaga di Jakarta meluas. 5) <i>Penutup</i> : Pembantahan Kapolda Metro Jaya terhadap pengeluaran izin penjualan tiket konser.
Skrip	<ol style="list-style-type: none"> 6) <i>What</i> : Penolakan Lady Gaga 7) <i>Who</i> : <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua LBH Buddhis Indonesia Pusat, Budiman b) Mantan Ketua MPR, Amien Rais c) Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushala Indonesia, Rhoma Irama d) Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel e) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga

	<p>Kerja (Binapenta), Reyna Usman</p> <p>f) Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar</p> <p>g) Kapolda Metro Jaya, Irjen Untung S Rajab</p> <p>8) <i>Where</i> :</p> <p>a) Jakarta</p> <p>b) Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Cimahi</p> <p>9) <i>When</i> : Rabu, 23 Mei 2012</p> <p>10) <i>Why</i> :</p> <p>a) Konser Lady Gaga akan berpengaruh pada psikologis anak muda</p> <p>b) Masih banyak urusan negara dan agama yang lebih penting</p> <p>c) Lady Gaga dinilai lebih banyak sisi negatifnya</p> <p>11) <i>How</i>: pengiriman surat ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang dilakukan oleh LBH Buddhis</p>
Tematik	<p>12) Penolakan konser Lady Gaga yang meluas</p> <p>13) Polemik izin konser Lady Gaga tetap memanas.</p>
Retoris	<p>14) Penggunaan kata: Hedonis, Finalisasi,</p> <p>15) Grafis : Ditempatkan pada halaman utama koran</p>

Dari analisis sintaksis yang dilakukan pada berita yang dimuat oleh Republika pada hari Kamis, 24 Mei 2012, Republika memuat sebuah berita dengan *headline* 'Penolakan Lady Gaga Meluas'. Dari penggunaan judul berita yang dilakukan Republika tersebut, sudah terlihat jelas apa yang ingin disampaikan oleh Republika. Hal ini kemudian didukung dengan *lead* berita yang ditampilkan.

"...Penolakan terhadap rencana konser Lady Gaga di Jakarta

LBH Buddhis Indonesia Pusat, Budiman, tegas menolak konser Lady Gaga di Indonesia...” (Republika, 24 Mei 2012)

Dalam *lead* tersebut juga sekaligus menyebutkan Ketua LBH Buddhis Indonesia, Budiman sebagai sumber informasi Republika. Selain Budiman, Republika juga mengambil beberapa sumber informasi lainnya, antara lain Mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushala Indonesia, Rhoma Irama, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), Reyna Usman, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Muhaimin Iskandar, serta Kapolda Metro Jaya, Irjen Untung S Rajab.

Pada penutup berita, Republika menampilkan kutipan pertanyaan Kapolda yang membantah terkait pengeluaran izin atas penjualan tiket Lady Gaga yang telah dikeluarkan sejak Maret sebelumnya.

“...”Polisi mana dan di sektor apa (yang memberi izin)?”..”
(Republika, 24 Mei 2012)

Kutipan pertanyaan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab tersebut sengaja dimuat oleh Republika agar pembaca dapat menentukan penilaiannya sendiri terhadap pertanyaan tersebut.

Pada analisis skrip, wartawan Republika dapat menampilkan secara lengkap unsur kelengkapan yang harus dimiliki dalam sebuah

penolakan terhadap rencana konser Lady Gaga di Indonesia. Republika menampilkan beberapa pihak sekaligus sebagai bahan pemberitaannya, terutama dari LBH Buddhis Indonesia yang diwakili oleh Budiman selaku ketua. Pengambilan sumber tersebut sengaja dilakukan oleh wartawan Republika karena ingin meyakinkan pembaca bahwa tidak hanya umat Islam saja yang menolak. Karena selama ini, umat Islam selaludiidentikan dengan penolakan terhadap rencana konser Lady Gaga.

Berita tersebut diambil pada Rabu, 23 Mei 2012. Namun dalam pengambilan berita tersebut, wartawan hanya menyebutkan spesifik satu tempat, yaitu Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Cimahi sedangkan yang lainnya Republika hanya menampilkan Jakarta. Berita itu sendiri menitikberatkan pada alasan-alasan penolakan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang disebutkan dalam berita tersebut.

Kemudian pada analisis tematik, ada dua tema yang ingin disampaikan wartawan Republika melalui tulisannya. Pertama, tentang penolakan Lady Gaga itu sendiri yang kian meluas. Hal ini selain dapat dilihat pada judul berita, juga dapat dilihat pada *lead* yang dimuat. Untuk mendukung tema ini, wartawan Republika selanjutnya menuliskan langsung pernyataan yang disampaikan oleh Budiman

berdasarkan masukan dari umat Buddha anggota LBH Buddhis Indonesia dan memperhatikan pemberitaan media massa.

Pada paragraf berikutnya, wartawan Republika menuliskan tindak lanjut yang dilakukan LBH Buddhis untuk menolak konser Lady Gaga.

“...Sebagai bentuk keseriusan atas penolakan ini, organisasinya juga mengirim surat ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebagai alat hukum yang bisa jadi pertimbangan izin konser dari kalangan umat beragama. Melalui rumah-rumah ibadah dan perkumpulan kaum muda Buddha, Budiman beserta aktivis Buddha lainnya mengimbau untuk tak menonton Lady Gaga...”
(Republika, 24 Mei 2012)

Republika juga menampilkan pernyataan dari Budiman mengenai alasan penolakan, yakni karena konser Lady Gaga dinilai akan berdampak pada kondisi psikologis anak muda yang masih labil dan sebagai upaya demoralisasi yang menjerumuskan anak muda pada budaya hedonis.

Selain dari Ketua LBH Buddhis Indonesia Budiman, Republika juga memuat pernyataan dari Mantan Ketua MPR Amien Rais dan Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushala Indonesia Rhoma Irama untuk memperkuat tema yang disampaikan. Dalam teks beritanya, Republika menampilkan Amien Rais yang menyarankan kepada penggemar Lady Gaga untuk menyaksikan konsernya lewat internet saja dan juga menyatakan pendapat bahwa

... pihak dibandingkan menanggapi kontroversi terhadap rencana konser Lady Gaga di Indonesia.

Selanjutnya wartawan Republika menuliskan alasan lain yang menyebabkan penolakan konser yang disampaikan oleh Rhoma Irama. Rhoma Irama menilai lebih banyak hal negatif yang diperoleh dari konser Lady Gaga.

“...Menurut Rhoma, penyanyi perempuan itu jelas-jelas menyatakan dirinya monster alias setan...” (Republika, 24 Mei 2012)

Wartawan Republika juga berusaha menampilkan pendapat dari pihak Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel yang memiliki pandangan berbeda dari yang telah disampaikan oleh wartawan Republika sebelumnya. Dalam teks beritanya, Republika menjelaskan pendapat Scot bahwa keputusan konser Lady Gaga tergantung pada masyarakat Indonesia secara luas, bukan berdasarkan kepentingan kelompok kecil. Selanjutnya wartawan Republika mengurai pandangan yang dikemukakan oleh Scot terhadap Lady Gaga itu sendiri dan harapannya pada Indonesia.

“...Dubes AS lalu mengatakan, Lady Gaga adalah kaum seniman yang menyimbolkan kebebasan berekspresi. Ia mengimbau agar kebebasan berkespresi ini harus dijaga sebagai simbol kebebasan dan toleransi di Indonesia...” (Republika, 24 Mei 2012)

Tema kedua yang ingin disampaikan oleh wartawan Republika

memanas. Dalam teks beritanya, wartawan Republika mencoba menjelaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang melakukan proses terhadap izin kerja Lady Gaga di Indonesia yang sebentar lagi selesai. Untuk mendukung penyampaian tema ini, wartawan Republika menjelaskan secara detail pada teks berita penerbitan izin yang telah dilakukan oleh Reyna Usman selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

“...Pada 19 Maret, Ditjen Binapenta mengeluarkan izin 147 TKA, yaitu lima penyanyi, 20 musisi, 15 penari, 72 kru, 25 manajer artis, dan 10 petugas keamanan...” (Republika, 24 Mei 2012)

Untuk melanjutkan tema yang ingin disampaikan, wartawan Republika menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang diterima dari Ditjen Binapenta tersebut, Kemenakertrans kemudian mengajukan rekomendasi visa kerja 128 TKA sebagai syarat visa yang akan dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi.

Kemudian, wartawan Republika menguraikan pernyataan dari Menakertrans Muhaimin Iskandar mengenai syarat yang harus dipatuhi oleh Lady Gaga. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan pernyataan yang terdapat dalam teks berita berikut.

“...”Ada tiga hal yang harus dapat perhatian khusus dalam penampilan Lady Gaga, yaitu lirik lagu, pakaian, dan aksi

Selain pernyataan dari dua sumber informasi tersebut, untuk menjelaskan tema bahwa polemik izin konser Lady Gaga tetap memanas, wartawan *Republika* juga menampilkan pernyataan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Untung S Rajab yang menegaskan sikap mereka untuk tidak memberikan rekomendasi terhadap konser Lady Gaga walaupun pihak penyelenggara sudah memenuhi persyaratan.

“...Ia mengatakan, meski promotor sudah melengkapi persyaratan, belum tentu izin konser bisa dikantongi, karena ada faktor lain. Faktor itu adalah norma susila dan hukum Indonesia...” (*Republika*, 24 Mei 2012)

Dalam teks beritanya, wartawan *Republika* kemudian menjelaskan faktor yang menjadi tidak dikeluarkannya izin atas konser tersebut.

Pada analisis retorik, terdapat penggunaan istilah yang sengaja ditekankan oleh wartawan *Republika*, antara lain ‘hedonis’ untuk menjelaskan gaya hidup yang berorientasi pada kemewahan dan kesenangan hidup. Kemudian itu penggunaan istilah ‘finalisasi’ untuk menggambarkan suatu proses yang sedang diselesaikan. Selain penggunaan istilah, pada unsur grafis atau dari segi tata letak berita tersebut dimuat di halaman utama koran, yang berarti *Republika*

Gambar 3.5

Tampilan Berita Pada Republika, 24 Mei 2012

MAHAKA GROUP
KEMAS, 24 MEI 2012
13:45:14
10000131/TAHUN KE 20

Rp. 3.500 / 20 Halaman
LIAR P. JAWA Rp. 2.000
Ditambah ongkos kirim

republika.co.id
No. 10000131/TAHUN KE 20

REPUBLIKA

Penolakan Lady Gaga Meluas

Erly Nazari, Indah Widandari

JAKARTA— Penolakan terhadap rencana konser Lady Gaga di Jakarta meluas. Kali ini datang dari LBH Buddha Indonesia, Ketua LBH Buddha Indonesia Pusat, Budiman, juga menolak konser Lady Gaga di Indonesia.

"Berlawanan dengan dari umat Buddha sebagai LBH Buddha Indonesia dan memperhentikan pemertanian media massa, LBH Buddha Indonesia menolak dipertanya konser Lady Gaga di Indonesia," kata Budiman di Jakarta, Rabu (23/5).

Sebagai bentuk kekeseruan atas penolakan ini, organisasinya juga mengirim surat ke Kapelri Federal Timur Pratiopo sebagai alat hukum yang bisa jadi pertunangan lain known dari kalangan umat beragama melalui rumah-rumah ibadah dan perkumpulan.

Berita Minggu 10 Mei 2012 144

Penolakan Lady Gaga Meluas

dari Man 1

drama, menial, sedangkan Lady Gaga lebih banyak nggafinya kelirong post-lirya.

keum muda Buddha. Budiman beserta aktivis Buddha lainnya mengkritik unitis tak menentu Lady Gaga.

"Daupak konser akan menggarah konflik politikis anak muda yang masih mudah meniru Kita mengimbu juga umat Buddha agar menggunakan uangnya untuk membantu sesama bangsa dan kerestidawanan sosial," kata Budiman.

Lembaga peminatannya, kata Budiman, memang tak langsung mengutus sidang norma. Namun, dasarnya awilindungi umat Buddha restra hukum. Budiman juga menditinya sebagai upaya demoralisasi anak bangsa yang mengpromosikan anak pada budaya bedonis.

Mantan ketua MPR Amren Rais menyuarakan agar masyarakat Indonesia, khususnya penggemar Lady Gaga, untuk menyebarkan konsekuensi lewat internet. Hal itu lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu. "Bisanya pun lebih murah" kata dia, saat kunjungannya ke Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Cimahi, Rabu.

Menurut dia, para pejabat negara dan pemuka agama tidak usah ikut serta mengendur persoalan konser penyanyi luar negeri tersebut. Sebab, masih banyak urusan negara dan agama yang lebih penting.

Ketua Umum Forum Silaturahmi Tukar Bisajud dan Mustanga Indonesia, Khansa

"Karena itu, kami menolak," kata pengagih sinewin. Ia juga menyuarakan penolakan Lady Gaga, Mother Monster. Menurut Rhema, penyanyi perempuan itu jelas-jelas menyatakan dirinya moneter alias setan.

Polemik Lady Gaga juga membuat Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Harrelt turun tangan. Ia mengaka terbitan pembiasaan soal konser Lady Gaga. Scott mengancam, rakyat Indonesia bisa memutuskan sendiri apakah Lady Gaga bisa konser atau tidak, asal jangan hanya mengikuti kemauan kelompok kecil.

Dubes AS juga mengatakan, Lady Gaga adalah kaum wirahan yang menyimpulkan

kebebasan berekspresi. Ia menyarankan agar kebebasan berekspresi ini harus dijaga sebagai simbol kebebasan dan toleransi di Indonesia.

Difinalisasi Dokumen izin konser Lady Gaga di Jakarta tetap mena-nas, sarasura Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus memproses izin serpi Lady Gaga di Indonesia yang kini mena-nas ke tahap finalisasi. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dinasperenah), Herza Irem, mengatakan izin tenaga kerja asing (TKA) terkait konser Lady Gaga tetap berjalan.

"Bila semua persyaratan dan prosedur sudah dipu-nahi, izin Menperserikan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dapat diproses dan dikeluarkan. Paling cepat seho-ru atau paling lambat tiga hari,"

kata Rayu, Raba.

Ia mengakui, Dirjen Binasperenah telah menebitikon dokumen Rencana Pegganaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau nama PT Prima Java Kewasi (PT Dindya Extertainstent). Dokumen ini adalah pintu awal masuknya mudiil asing ke Indonesia. Pada 19 Maret, Ditjen Binasperenah mengeluarkan izin 147 TKA, yaitu lima penyanyi, 20 musisi, 15 penari, 72 kera, 25 manajer artis, dan 10 petugas keamanan.

Dari dokumen itu, Kementerian juga telah mengajukan rekomendasi visa kerja kepada 120 TKA Rekomendasi itu salah satu syarat di-luhurkannya visa oleh Dirjen Imigrasi.

Namun, Sekretarisnara Nuchamin Iskandar memma-rtika bernama asli Steluti Juane Angelim Germantika

itu menghormati budaya dan tradisi Indonesia.

"Ada tiga hal yang harus dapat perhatian khusus dalam penampilan Lady Gaga, yaitu lirik lagu, pakaian, dan aksi panggung," kata Mubandina, kemarin.

Kepolda Metro Jaya Irfan Umung S Bala sebagai me-negasikan komisiannya untuk tidak merekomendasikan konser Lady Gaga di Jakarta, ia mengatakan, meski pemotor sudah menepati persyaratan, dalam terete lain konser bisa dilaksanakan, karena ada faktor lain. Faktor itu adalah norma nilai dan hukum Indonesia.

Kepolda juga menambahkan bahwa mengizinkan izin penampilan Ulet Lady Gaga sepih dilarang lain. "Punai mata dan di sekitar apa yang membuat orang," kata dia.

(Sumber: koran Republika, 24 Mei 2012)

c. Tolak Konser Lady Gaga (Republika, 25 Mei 2012)

Tabel 3.7
Analisis Republika, 25 Mei 2012

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : Tolak konser Lady Gaga 2) Latar : aksi penolakan konser 3) Sumber : a) Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Agus Suradika b) Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Fahmi Salim c) Juru Bicara Persekutuan Gereja Indonesia, Jeirry Sumampow d) Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Sukro Muhab e) Menko Polhukam, Djoko Suyanto f) Pengamat musik, Bens Leo 4) Pernyataan : Komunitas agama mendesak kepolisian tak mengizinkan Lady Gaga tampil di Indonesia. 5) Penutup : Pengamat musik, Bens Leo menilai Lady Gaga mampu menyesuaikan diri dengan budaya
Skrip	6) <i>What</i> : Penolakan konser Lady Gaga 7) <i>Who</i> : Komunitas agama dan puluhan ormas Islam Ibu Kota 8) <i>Where</i> : Jakarta 9) <i>When</i> : - 10) <i>Why</i> : Lady Gaga tak hanya menyinggung soal agama, tetapi juga bertentangan dengan budaya timur 11) <i>How</i> : Mendesak Kapolda Metro Jaya untuk tak mengizinkan Lady Gaga tampil di Indonesia
Tematik	12) Gelombang Penolakan terhadap konser Lady Gaga makin deras

Retoris	13) Penggunaan pilihan kata pada <i>headline</i> , 14) Penggunaan kata: Puluhan, Anarkistis, 15) Grafis : Sebagai berita utama dan disertai sebuah foto.
---------	---

Dari analisis sintaksis atau cara wartawan menyusun fakta, pada hari Jumat, 25 Mei 2012, Republika menyajikan berita dengan *headline* 'Tolak konser Lady Gaga'. Dari penggunaan judul *headline* tersebut, dapat dilihat frame Republika yang ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa konser Lady Gaga harus ditolak. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Republika melalui *lead*-nya yang menyampaikan bahwa penolakan terhadap konser Lady Gaga makin deras dengan mendesak pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin pertunjukkan kepada Lady Gaga dan juga disertai dengan alasan penolakan.

“...Gelombang penolakan terhadap konser Lady Gaga makin deras. Komunitas agama mendesak kepolisian tak mengizinkan konser penyanyi asal Amerika Serikat itu. Lady Gaga tak hanya menyinggung soal agama, tetapi juga bertentangan dengan budaya Timur. Pemerintah masih belum mengambil keputusan soal konser itu...” (Republika, 25 Mei 2012)

Dalam *lead* tersebut, Republika juga menyoroti kinerja pemerintah terhadap tindak lanjut kontroversi yang terjadi.

Dalam pemilihan sumber, sebenarnya Republika mencoba untuk lebih berimbang dengan menampilkan sumber-sumber informasi yang pro dan kontra terhadap penolakan konser. Adapun sumber informasi

Suradika selaku Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Fahmi Salim, dan Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Sukro Muhab. Sedangkan sumber informasi yang bisa dikatakan tidak setuju dengan penolakan Lady Gaga itu sendiri atau bisa dibilang sebagai pihak yang kontra dengan penolakan, antara lain juru bicara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan pengamat musik Bens Leo. mendapatkan pengamanan dari Polda Metro Jaya.

Berdasarkan analisis skrip pada berita ini, wartawan Republika memiliki kekurangan pada cara mengisahkan beritanya atau pada kelengkapan beritanya, yaitu tidak dapat menampilkan unsur kapan dan dimana tepatnya tempat peristiwa penolakan konser Lady Gaga itu terjadi. Sehingga wartawan Republika berusaha untuk mengkonstruksi realitas yang terjadi dengan melakukan penekanan berita pada unsur kenapa dan bagaimana penolakan konser terjadi, yakni dengan memuat beberapa pernyataan-pernyataan dari berbagai sumber informasi.

Kemudian pada analisis tematik atau cara wartawan Republika mengisahkan beritanya, terdapat sebuah tema yang ingin disampaikan kepada khalayak. Tema tersebut adalah gelombang penolakan

..pada *lead* berita, dimana Republika mencoba tentang aksi penolakan Lady Gaga yang sedang terjadi.

“...Gelombang penolakan terhadap konser Lady Gaga makin deras. Komunitas agama mendesak kepolisian tak mengizinkan konser penyanyi asal Amerika Serikat itu. Lady Gaga tak hanya menyinggung soal agama, tetapi juga bertentangan dengan budaya Timur. Pemerintah masih belum mengambil keputusan soal konser itu...” (Republika, 25 Mei 2012)

Selanjutnya, Republika menjelaskan siapa dan bagaimana upaya yang dilakukan serta alasan dalam menolak konser Lady Gaga sebagai penjelas dari *lead* yang ditampilkan.

“...Puluhan ormas Islam Ibu Kota mendesak Kapolda Metro Jaya untuk tak mengizinkan Lady Gaga tampil di Indonesia. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Agus Suradika mengimbau seluruh orams berideologi keagamaan atau ormas idealisme tertentu bersatu padu menolak liberalisasi budaya yang merusak akhlak bangsa, khususnya kaum muda...” (Republika, 25 Mei 2012)

Republika kemudian menampilkan beberapa pernyataan dari beberapa pihak yang turut menolak konser Lady Gaga di Indonesia, antara lain pernyataan dari Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Fahmi Salim dan Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Sukro Muhab . Hal ini dimaksudkan agar semakin memperkuat kalimat sekaligus tema berita ‘gelombang penolakan terhadap konser Lady Gaga makin deras’.

“...Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Fahmi Salim mengatakan, umat Islam harus jeli dan kritis karena isu Lady Gaga dimanfaatkan pihak anti-Islam agar

menolak, tapi tidak boleh anarkistis,” ujar Fahmi...” (Republika, 25 Mei 2012)

“...Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Sukro Muhab menilai tidak ada yang positif dari konser Lady Gaga dari sudut pandang mana pun. “Dilihat dari sudut pariwisata yang digemborkan pemerintah sepertinya tidak akan sebanding dengan pengorbanan martabat generasi muda bangsa,” ujarnya...” (Republika, 25 Mei 2012)

Selain pernyataan mengenai dukungan terhadap penolakan, Republika juga memuat beberapa pernyataan dari pihak yang secara tidak langsung mendukung konser Lady Gaga tetap digelar di Indonesia, antara lain dengan memuat pernyataan dari juru bicara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow, kemudian pernyataan dari Menko Polhukam yang memerintahkan Polri untuk menjaga konser Lady Gaga terkait niat dari Front Pembela Islam (FPI) yang akan mengacaukan jalannya konser, dan pernyataan dari pengamat musik Bens Leo yang menilai bahwa Lady Gaga adalah seorang yang profesional dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia.

“...Terkait dengan beberapa lagu Lady Gaga yang cenderung menghina agama Kristen, juru bicara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow menilai hal tersebut bukan pertama kali. Jeirry yakin konser Lady Gaga tidak akan mengganggu iman umat Kristen...” (Republika, 25 Mei 2012)

Jika ditelaah lebih lanjut dari kutipan pernyataan sumber pada berita tersebut, Republika berusaha untuk sedikit memprovokasi

mendukung konser tersebut adalah umat Kristen. Untuk itu, Republika menekankan bahwa umat Islam harus menolak konser tersebut.

Dari segi analisis retorik, terdapat beberapa pemilihan penggunaan kata yang sengaja dilakukan wartawan Republika untuk menekankan fakta berita tersebut. Salah satunya adalah penggunaan judul berita atau *headline*. Dari judul yang ditampilkan oleh Republika, yakni 'Tolak konser Lady Gaga', berita tersebut cenderung memiliki makna yang provokatif dan bersifat persuasif. Selanjutnya pada pemilihan kata 'puluhan' yang terdapat pada *lead* untuk menggambarkan bahwa ada banyak pihak-pihak yang menolak konser Lady Gaga tersebut. Kemudian penggunaan istilah 'anarkistis' untuk aksi penolakan yang dihimbau tidak menjurus atau bersifat anarki.

Pada unsur grafis Republika, untuk mendukung isi dari teks berita yang ditampilkan, Republika kemudian memasang sebuah foto tentang penolakan konser Lady Gaga. Keterangan foto tersebut menyebutkan sejumlah jamaah AQL Islamic Center meneriakkan yel-yel penolakan kedatangan Lady Gaga di Jakarta, Kamis (24/5). Dalam foto tersebut terlihat demonstran merupakan ibu-ibu yang semuanya mengenakan jilbab sedang mengacungkan tangan dengan membawa spanduk yang berisikan tentang penolakan konser Lady Gaga. Selain foto, Republika juga menempatkan beberapa judul berita mengenai

- pembahasan yang akan disampaikan oleh Republika pada halaman selanjutnya. Beberapa judul berita ini kemudian ditandai dengan penanda yang berupa segitiga berwarna merah.

Secara keseluruhan, termasuk berdasarkan penempatannya pada *headline*, hal ini kemudian menggambarkan bahwa Republika menganggap bahwa isu penolakan konser Lady Gaga memiliki nilai

Gambar 3.6

Tampilan Berita Pada Republika, 25 Mei 2012

MAHAKA GROUP

RUMAH 21 Mei 2012
43108 14133
KONDISI 120/14133

Rp. 3.500 / 44 Halaman
LIHAT PAKSA Rp. 4.500
Ditambah ongkos kirim

republika.co.id

Republika Online
Republika Mobile

REPUBLIKA

Grasi Corby
Janggal
Hal 3

Tim Liga Selection
Sempat Repotkan Inter
Hal 8



Krisis Yunani
tak Ganggu RI
Hal 14



Indah Wulandari, A Syalaty Ichsan
Penolakan jangsan mengpu-
nakan aksi anarkistis.

JAKARTA — Gelombang penolakan terhadap konser Lady Gaga makin deras. Komunitas agama menolak kepulauan tak mengizinkan konser penyanyi asal Amerika Serikat itu. Lady Gaga tak hanya menyingsing soal agama, tetapi juga berkontes dengan budaya Timur. Pemerintah masih belum mengambil keputusan soal konser itu.

Puluhan ulama Islam Kota Lumbajang Capofala Metro Jaya untuk tak mengizinkan Lady Gaga tampil di Indonesia. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Agus Suradika

menghimbau seluruh umat beragama mengamati aksi konser itu karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Banyaknya yang beribadah, akibat berbagai kebiasaan kaum muda.

Penampilan Lady Gaga dikawatirkan membawa unsur pornografi dan pornoaksi. "Sebagai umat Islam kita sudah terpacu dari kewajiban moral, kami agar aksi tak berdiri tegak," ujar Agus. Dia meminta belal menjaga Muslim yang berpartisipasi agar tidak melakukan aksi kekerasan hingga anarkistis.

Sekjen Majelis Intellektual dan Ulama Muda Indonesia (MIMUI) Fahmi Sallim mengatakan, umat Islam harus jeli dan kritis karena itu Lady Gaga dimanfaatkan pihak sekuler agar ada aksi menentang disertai keran anar-

khista. "Kita sebagai umat Islam tak boleh anarkistis," ujar Fahmi. Takrif dengan beberapa lagu, Lady Gaga yang mendukung warganya agama Kristen. Juru bicara Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jerry Samudra juga menilai hal tersebut bertentangan. Jerry yakin konser Lady Gaga tidak akan mengganggu iman umat Kristen.

Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Sukro Mubandah menilai tidak ada nilai positif dari konser Lady Gaga dan sudah seharusnya mana pun "Diluar dari nilai, pertentangan yang digambarkan pemerintah sepertinya tidak akan sebanding dengan pengabdian masyarakat di tempat lain yang berprestasi."

Menka Pratikno Djoko Soyaning memerintahkan Polri menjaga konser Lady Gaga

"Polisi harus bisa jaga keamanannya," kata Djoko di Istana Negara, kemarin. Djoko berharap ya nilai-nilai terkait dengan nilai konser bisa membentengi hati yang paling baik. Djoko menentang keputusan soal konser itu pada Mubes Polri dan bisa menyempatkan dengan kondisi di Indonesia. Djoko mengkritisi dilatan Front Pembela Islam yang mengancam sanggahan konser dari dalam karena telah mengancam 130 titik. Menurut Djoko, tidak boleh ada ancaman-mengancam dalam negara demokrasi. "Kalau ngapik suka, ya ngapik usah nonton," kata Djoko.

Pengamat musik Denis Leo menilai Lady Gaga mampu menunjukkan diri dengan budaya Indonesia. "Saya kira penyanyi luar negeri profesional dan akan mendapatkan dua. Begitu juga Lady Gaga," ujar Denis, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah sempat membatalkan konser Lady Gaga

Pada Tegakan
tak Ber
Rekomendasi
Lady Gaga dan
Bunga Gagap
— Hal 10
Sapar Lar yang
Luhur dan Anah
— Hal 11

3. Perbandingan Frame Kompas dan Frame Republika

Dari kedua frame yang telah dibahas, terlihat perbedaan cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh kedua media dalam memberitakan dan menyajikan suatu isu yang sama, yakni kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.8

Perbandingan Frame Kompas dan Republika

Frame Kompas	Frame Republika
Konser Lady Gaga Masih Memiliki Peluang Untuk Digelar	Konser Lady Gaga Layak Untuk Ditolak

Dari tabel perbandingan frame diatas, dapat dilihat Kompas menyampaikan pandangannya dengan mengkonstruksi realitas bahwa konser Lady Gaga masih memiliki peluang untuk dapat digelar. Hal ini dapat dilihat dari hampir setiap berita yang dimuat oleh Kompas mengenai kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia menampilkan pembahasan mengenai rekomendasi izin konser. Kompas dengan sengaja lebih jarang mengulas berita tentang penolakan, karena mereka menilai bahwa inti dari peristiwa tersebut adalah pada permasalahan rekomendasi izin konser dan permasalahan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

Sedangkan pada analisis framing yang dilakukan pada beberapa berita yang ditampilkan oleh Republika, peneliti dapat melihat bahwa Republika menganggap bahwa peristiwa kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia memiliki nilai berita yang tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Bruce D. Itule dan Douglas A. Anderson (2007) bahwa ada beberapa kriteria yang menentukan sebuah nilai berita, antara lain *Timeliness* atau peristiwa kontroversi rencana konser Lady Gaga tersebut baru saja atau sedang terjadi. *Proximity*, peristiwa tersebut sebagian besar terjadi di Jakarta, yakni tempat dimana kantor-kantor media besar Indonesia berada termasuk Republika. *Conflict*, dalam peristiwa tersebut terjadi aksi penolakan terhadap rencana konser Lady Gaga. *Eminence & Prominence*, dimana dalam peristiwa tersebut melibatkan Lady Gaga, seorang penyanyi asal Amerika Serikat yang terkenal di seluruh dunia. *Consequence & Impact*, Republika menganggap bahwa peristiwa tersebut dekat dengan kepentingan Islam, karena penolakan yang terjadi banyak dilakukan oleh ormas Islam. Berlangsungnya konser Lady Gaga dinilai akan memiliki dampak yang buruk untuk masyarakat, terutama umat Islam.

Republika berusaha menyampaikan pandangannya dengan mengkonstruksi realitas bahwa konser Lady Gaga tersebut layak untuk ditolak. Hal ini tercermin dari judul-judul dan juga tema yang ditampilkan Republika lebih banyak mengandung unsur-unsur yang menekankan kepada penolakan konser.

Perbandingan lainnya yang dapat dilihat adalah tingkat intensitas dan jumlah pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut. Kompas terhitung memuat sebanyak 13 berita yang berkaitan dengan rencana konser Lady Gaga sejak 15 Mei 2012 – 3 Juni 2012. Sedangkan Republika menampilkan sejumlah 17 berita sejak 19 Mei 2012 – 28 Mei 2012. Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa Republika memiliki kepentingan lebih terhadap peristiwa kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia dibandingkan Kompas. Republika menganggap bahwa dengan jumlah pemuatan berita tersebut, diharapkan khalayak semakin memahami frame sekaligus sikap yang ingin disampaikan oleh Republika, yakni bahwa konser Lady Gaga layak untuk ditolak.

Pemuatan berita tersebut dilakukan semenjak terjadinya kontroversi Lady Gaga hingga pada saat pembatalan konser yang diumumkan secara resmi oleh Lady Gaga serta pasca kontroversi tersebut. Perbedaan antara kedua media tersebut juga ditunjukkan dalam penempatan berita. Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, Republika terhitung telah menjadikan berita kontroversi tersebut sebagai *headline* atau berita utama sebanyak tiga kali. Hal tersebut juga dapat menggambarkan Republika berusaha secara terang-terangan menegaskan kepada khalayak penolakan konser Lady Gaga. Sedangkan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti pada Kompas, berita kontroversi

dari koran tersebut. Kompas menganggap bahwa berita kontroversi tersebut sebenarnya biasa-biasa saja.

Kedua media tersebut juga turut memuat opini dari beberapa pihak yang menyampaikan pandangannya terhadap kontroversi rencana konser Lady Gaga. Pemuatan opini ini dimaksudkan agar media memberikan pandangan dari pihak lain yang memiliki tujuan yang sama dengan media tersebut. Atau dengan kata lain, pemuatan opini dimaksudkan agar membuat subjektivitas sebuah media menjadi berkurang. Republika lebih banyak menampilkan opini dari pihak-pihak yang melihat sisi negatif baik dari Lady Gaga maupun konser yang akan dilaksanakannya. Sedangkan pada Kompas lebih menampilkan opini dari pihak yang mengemukakan dukungannya terhadap rencana konser Lady Gaga di Indonesia.

Namun selanjutnya yang menjadikan perbedaan antara Kompas dan Republika tersebut semakin menonjol adalah pemuatan tajuk rencana. Tajuk rencana ini sangat penting karena merupakan cara pandang atau opini redaksi dalam melihat suatu isu atau berita yang diangkat. Republika memuat tajuk rencana yang berhubungan dengan kontroversi Lady Gaga sebanyak tiga kali. Sementara itu, peneliti tidak menemukan hal yang sama dilakukan oleh Kompas. Pemuatan tajuk yang dilakukan oleh Republika tersebut mencerminkan pandangan redaksi dan juga sekaligus menegaskan sikap Republika yang memiliki kepentingan lebih terhadap

Sebagai contoh dapat dilihat dari berita yang dimuat oleh kedua media pada 25 Mei 2012 atau tepat seminggu sebelum rencana konser Lady Gaga digelar. Pada saat itu peristiwa yang sedang terjadi adalah penolakan Lady Gaga. Meskipun peristiwa yang terjadi adalah sama, namun ada perbedaan cara menyampaikan berita tersebut kepada khalayak. Republika melihat peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang memiliki nilai berita yang tinggi dengan menjadikan berita tersebut sebagai *headline* dengan judul 'Tolak Lady Gaga'. Dalam pemberitaannya, Republika banyak mengaitkan rencana konser Lady Gaga dengan faktor agama dan budaya yang dinilai tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut sekaligus merupakan kesempatan bagi Republika untuk menegaskan sikap mereka dalam menolak konser Lady Gaga.

Sedangkan Kompas melihat peristiwa tersebut sebagai peristiwa penolakan yang biasa-biasa saja. Penggunaan judul 'Penolakan Konser Masih Bergulir' dan penempatan berita pada rubrik Metropolitan juga menggambarkan pandangan Kompas bahwa sebenarnya kontroversi atau peristiwa penolakan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Pada pemberitaannya, Kompas sendiri tidak menunjukkan sikap dukungannya terhadap penolakan terhadap konser Lady Gaga maupun sebaliknya dengan menampilkan proses penolakan dan peluang rekomendasi perizinan konser. Kompas melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Framing Kompas dan Republika

Dari perbandingan frame yang dilakukan terhadap Kompas dan Republika mengenai kontroversi rencana konser Lady Gaga, dapat diketahui ada dua faktor yang mempengaruhi framing terhadap pemberitaan yang dilakukan kedua media tersebut seperti yang disampaikan oleh Shoemaker dan Reese dalam Sudibyo (2001). Faktor internal media dipengaruhi oleh para pekerja media, kegiatan rutin media, organisasi media dan ideologi media. Sementara dari faktor ekstramedia yang mempengaruhi media adalah sumber berita dan sumber penghasilan, serta pemerintah (eksternal).

Pada internal media, kepemilikan media masih menjadi faktor penting yang mendasari perbedaan pemberitaan pada setiap media massa. Karena, perbedaan pemikiran, visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai maka dalam perjalanan media massa tersebut harus disesuaikan dengan kepentingan pemilik media. Pemilik media yang selalu menjadi direktur utama dalam perusahaan media massa menjadi jalan utama bagi pemilik media tersebut untuk menentukan arah pemberitaan media yang dipimpinya. Seperti yang disampaikan pada Eoin Devereux (2003) dalam bukunya "*Understanding The Media*" menyebutkan tentang pengaruh kepemilikan media terhadap isi berita adalah "adanya ideologi yang

Ideologi sendiri diartikan sebagai kerangka berpikir atau sebagai referensi, acuan individu, golongan dan organisasi dalam menafsirkan realitas serta bagaimana mereka menyikapi realitas yang ada tersebut. Melalui ideologi, media mempunyai kekuasaan dan hak untuk menentukan apa saja yang akan disajikan dalam pemberitaannya kepada khalayak (Shoemaker dan Reese dalam Sudibyo, 2001 : 12)

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Pers Ditengah Konflik Sosial ; Studi Analisis Isi Pemberitaan Kompas & Republika Tentang Konflik Sosial Di Maluku Selama Bulan Maret 1999 yang telah selesai dilakukan oleh Budhi Hermanto pada tahun 2001 silam atau pada saat dimana Republika melakukan pemberitaan tersebut belum diambil alih oleh Group Mahaka Media, menyebutkan bahwa Republika pada saat itu banyak menampilkan berita yang cenderung kearah kepentingan umat Islam. Hal tersebut dilakukan Republika karena mereka telah lebih dulu dikenal memiliki kedekatan dengan Islam. Latar belakang Republika itu sendiri yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tujuan untuk mengimbangi dominasi media sekuler dan Kristen pada masa awal berdirinya turut menggambarkan ideologi yang dimiliki oleh Republika.

Erik Thohir adalah pemilik media sekaligus Direktur Utama Republika terhitung semenjak Group Mahaka Media mengambil alih

kepemilikan Republika telah berganti, namun Republika masih menjalankan visi dan misi yang sama seperti sebelumnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Meilyani Suryana (2008) mengenai ideologi pemberitaan surat kabar Republika dan Kompas dalam kasus penerbitan majalah Playboy Indonesia, visi dan misi Republika sendiri adalah menjadikan Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin yaitu Rahmat bagi semua makhluk di dunia. Dan misinya adalah menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional (Suryana, 2008 : 34-35)

Pemilik media menginginkan aspek hiburan dan Islami yang mendominasi isi media. Pemilik media menghindari aktivitas politik atau berita-berita politik secara berlebihan, karena ia tidak ingin terlibat dalam dunia politik yang akan berimbas pada konflik kepentingan politik terhadap media yang dipimpinnya (Keller, 2009:54-55). Oleh sebab itu, peneliti menilai Republika menganggap kontroversi rencana konser Lady Gaga ini sebagai peristiwa yang menarik untuk diangkat, karena

Erik Thohir memegang hak untuk menentukan pimpinan redaksi dan selalu melibatkan diri dalam pengambilan keputusan redaksi dan pemberitaan sehari-hari. Erik Thohir juga memiliki andil dalam menyunting artikel-artikel yang akan dimuat. Isi dan artikel yang dimuat secara tidak langsung mencerminkan kepribadian media Republika yang religius salah satunya budaya perusahaan, dimana pembaca Republika yang mayoritas muslim, maka Republika ini selalu berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai universal, damai dan menjaga persatuan dan kepentingan umat Islam (Keller, 2009: 63)

Ideologi Republika ini dapat dilihat dari pemuatan berita kontroversi rencana konser Lady Gaga di Indonesia. Republika melakukan tugas dan fungsinya yakni menjaga nilai-nilai kelompok dalam hal ini Islam dengan menekankan aksi penolakan dan mencoba mengaitkan bahwa Lady Gaga tidak sesuai dengan agama dan budaya.

Jakob Oetama adalah Direktur Utama Kompas sekaligus salah satu pendiri Kompas. Jakob Oetama dikenal sebagai sosok yang sosialis karena bersama P.K. Ojong (alm.) pada saat akan mendirikan Kompas sudah mengambil sikap sosialisme golongan karya, golongan profesional dan berkompeten. Aksi sosial mereka adalah aksi 'mengganti senjata dengan buku pengetahuan; mengganti sentimen dengan pikiran dingin; mengisi kekosongan dalam bidang pendidikan melalui usaha media cetak'

peneliti mengartikan bahwa Kompas berusaha untuk menjadi media yang menawarkan 'jurnalisme damai' dan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sekaligus menjelaskan ideologi yang dimiliki oleh Kompas.

Ideologi Kompas ini kemudiandicerminkan dalam visi dan misi Kompas, yakni menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat tedidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera.

Sesuai dengan visi dan misinya untuk menghargai kebhinekaan, Kompas tidak ingin masyarakat terpecah akibat kontroversi yang terjadi dengan tidak menampilkan secara langsung sikap mereka yang mendukung atau menolak konser Lady Gaga di Indonesia. Kompas hanya berusaha menyampaikan fakta-fakta bahwa konser tersebut masih memiliki peluang untuk dapat digelar. Secara keseluruhan, Kompas menganggap bahwa berita kontroversi tidak perlu dibesar-besarkan.

Isi pemberitaan dalam sebuah media tidak hanya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Namun terdapat juga faktorekstramedia atau faktor eksternal media. Faktor ekstramedia merupakan faktor yang mempengaruhi media dilihat dari sumber berita dan sumber penghasilan,

Dari pemberitaan yang telah dilakukan kedua media baik-
Republika maupun Kompas mengenai kontroversi rencana konser Lady
Gaga di Indonesia, sumber berita merupakan faktor utama yang
mempengaruhi isi pemberitaan terhadap kedua media tersebut. Sumber
berita tidak dapat dilihat sebagai sumber yang netral. Sumber berita yang
tersebut tentunya dipilih oleh masing-masing media secara sengaja karena
ada maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh media itu sendiri.
Pemilihan sumber yang tidak berimbang akan mengakibatkan suatu berita
cenderung bersifat subjektif.

Sebelum pengumuman pembatalan konser yang disampaikan
secara resmi oleh pihak manajemen Lady Gaga pada 27 Mei 2012,
Republika dan Kompas berusaha mengumpulkan berbagai fakta yang
diperoleh dari sumber informasi mereka masing-masing. Berdasarkan
analisis yang dilakukan oleh peneliti, Republika lebih banyak mengambil
sumber informasi dari pihak-pihak yang kontra terhadap rencana konser
Lady Gaga, terutama pengambilan sumber dari pihak non-pemerintah.
Kalaupun ada pihak pemerintah yang dijadikan sumber informasi oleh
Republika, itupun yang menunjukkan sikap penolakannya terhadap
rencana konser Lady Gaga di Indonesia. Republika juga memuat beberapa
sumber yang menyatakan dukungannya terhadap rencana konser, namun
hal tersebut diberitakan dalam porsi yang tidak seimbang dengan yang

Republika untuk menegaskan bahwa penolakan berasal dari berbagai kalangan.

Sedangkan Kompas lebih banyak mengambil sumber berita dari pihak pemerintah terutama dari pihak kepolisian terkait masalah rekomendasi izin konser. Kompas hanya memuat beberapa berita dari sumber yang menyatakan dukungannya terhadap rencana konser. Disamping itu, Kompas juga sempat menampilkan berita dengan sumber yang mendukung penolakan, namun berita tersebut tetap diikuti dengan sumber dari kepolisian terkait peluang rekomendasi izin konser.

Selain faktor sumber berita, selanjutnya adalah faktor sumber penghasilan media. Dengan diangkatnya suatu berita tertentu yang dianggap memiliki nilai berita yang tinggi, maka diharapkan penjualan dari media tersebut akan ikut naik. Naiknya jumlah penjualan ini akan memiliki pengaruh pada sumber penghasilan yang akan diterima dari media tersebut. Selain dari hasil penjualan media secara murni, sumber penghasilan lainnya adalah iklan. Para pemasang iklan akan menganggap bahwa media tersebut sebagai media yang tepat untuk meawarkan produk dan jasanya kepada khalayak.

Peneliti menilai pemuatan berita kontroversi rencana konser Lady Gaga tersebut ada kaitannya dengan sumber penghasilan terhadap kedua media baik Kompas maupun Republika. Berdasarkan pengamatan yang

ditayangkan di Republika berbeda dengan Kompas. Dalam koran Republika, iklan-iklan yang ditampilkan mengenai segala sesuatu yang bersifat Islami, misalnya iklan fashion Islami untuk muslimah, naik haji & umroh, pendidikan Islam, dan sebagainya. Sedangkan iklan yang dimuat oleh Kompas lebih bersifat umum. Peneliti memiliki asumsi bahwa pemuatan berita kontroversi rencana konser Lady Gaga tentunya dimuat